

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN POTENSI RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR PERIODE 2009-2013

MUTHIA NURFITRIANI R.



JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN POTENSI RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR PERIODE 2009-2013

**Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

Disusun dan diajukan oleh :

**MUTHIA NURFITRIANI R.
A 111 10 264**



Kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN POTENSI RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR PERIODE 2009-2013

Disusun dan diajukan oleh

MUTHIA NURFITRIANI R.
A111 10 264

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 1 Juni 2015

Pembimbing I




Dr. Hj. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si
NIP. 19660811 199103 2 001

Pembimbing II



Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si
NIP. 19590303 198810 1 001

**Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin**



Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D
NIP. 19610806 198903 1 004

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN POTENSI RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR PERIODE 2009-2013

Disusun dan diajukan oleh :

MUTHIA NURFITRIANI R.

A111 10 264

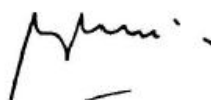
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 1 Juni 2015, dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si	Ketua	1. 
2.	Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. H. Muh. Yunus Zain, MA.	Anggota	3. 
4.	Dr. Nursini, SE., MA.	Anggota	4. 
5.	Dr. Paulus Uppun, SE., MA.	Anggota	5. 

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Drs. Muhammad Yusri Zamruhi, MA. Ph.D

NIP. 19610806 198903 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MUTHIA NURFITRIANI R.
NIM : A111 10 264
Jurusan/Program studi : ILMU EKONOMI/STRATA SATU (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN POTENSI RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR
PERIODE 2009-2013**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 10 Juni 2015

Yang Membuat pernyataan


MUTHIA NURFITRIANI R.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dan kemuliaan yang agung penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, atas Rahmat, Anugerah dan Perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektifitas dan Potensi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar Periode 2009-2013”** ini sesuai pada waktunya. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan baik.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

- Dua sosok terbaik dalam hidup dan seumur hidup, ayahanda Ir. Ramlan, M.Si dan ibunda Ir. Nurjanani, M.Si.
- Bapak Drs. Muh. Yusri Zamhuri, M.A., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Ekonomi.
- Ibu Dr. Hj. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si. selaku pembimbing I, yang tak bosan-bosannya memberi arahan, bimbingan, do'a, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama proses pembuatan skripsi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis serta meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak Prof. Dr. H. Muh. Yunus Zain, MA., Ibu Dr. Nursini, MA., Bapak Dr. Paulus Uppun, SE., M.Si selaku dosen Penguji.
- Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin yang dengan mulianya telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar kepada penulis selama perkuliahan.
- Seluruh Staf Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu kami dalam hal administrasi, terkhususnya buat Pak Parman, Pak Akbar dan Pak Safar.
- Bapak dan Ibu pada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar serta Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kota Makassar.
- Kakak dan adik penulis Muh. Muflih R., Muh. Naflih R., Fauziah Achriani R., Rizkah Amaliah R., dan Muh. Fachri Rafi R.
- Seluruh keluarga besar “**Spultura 2010**”, Kak Kusumawardhani, Sri Wahyuni, Sri Fatmasari Syam, Indah Gita Cahyani (terbaik dan tersayang), Amalia Nurul Alifa, Laura Virginia Sallolo, Dian Aziza JS., Muhammad Nakib Rabbani, Kevin Tjandra, Sukmawan, Liliyani, Herianti S., Surya Ariwirawan, Vina Tamaya, Restuti Anggereiny R., Jennifer M A Parung, Tri Septia Nugraha, Eva Irwanti, Muh. Ilham, La Caesar MM., M. Rivqi Islan A., Muh. Ainul Yakin, Sri Raehan, Fatmawati, Roni Wijaya,

Teguh Susilo Toni, Munawiruddin, Yeni Masni, Yudi Pratama, Ahmad Faqhruddin, Fajariah, Yusri Pasolang, Patotori, Fuad Dwi Darmawan, Dede Darmanto, Sudirman Kahar, Monica Cahya Dini, Rifqa Latifadina, Ikram Sutanto, Ashar, Andi Tri Darmanasatya, Muh. Nizar Ramadhan, Elvira Fransiska A., Ayu Yustika, Salman Samir, dan Wahyudi Husaen. Terima kasih atas bantuan, dukungan, motivasi, dan semangat serta kesabarannya selama kuliah hingga saat ini kepada penulis. Semoga gelar sarjana yang tercapai dapat kita persembahkan serta amalkan ilmu yang kita dapat kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta agama.

- Teman-teman di Fakultas Ekonomi terkhusus buat Spartans, Regalians dan seluruh keluarga besar Jurusan Ilmu Ekonomi yang bernaung dalam “Rumah Merah” HIMAJIE (Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi).
- Teman-teman KKN Reguler Gel. 85 Posko Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara, Syandi Ardin, Martin Rumahorbo, Kaswan, Irene Silambi Mangolo.
- Teman seperjuangan waktu ujian Riski Tasik, SE., Fahria Mading, SE., Helki Lugis, SE.
- Saudara-saudari terbaik, terkasih dan tercinta “**White House**” (NTI DB. 25), Rifqa Latifadina, SE., Kurnia, S.Kg, Ahyadi Jusaeman, SE., Bos Muh. Nizar Ramadhan, SE., Muh. Ilham, C.SE. (secepatnya sarjana), Sukmawan, SE., Herianto, SE., dan Herawati Hasan, S.Kg.
- Saudara-saudari terbaru, tersayang, *hits*, dan menyenangkan Afifa Fadhilah Tamrin, SE., Siti Maulidya, SE., Sri Novi Hardianti, SE., Nur Alif

Muallim, SE. (akhirnya sarjana), Husni Mubarak, C.SE. (secepatnya sarjana), Muh. Yassir, SE.

- **PEJUANG TOGA**, Nur Alif Muallim, SE., Muh. Rizky Syam, SE., Cakra Iswahyudi, SE., Muh. Ilham, C.SE., Husni Mubarak, C.SE., Fakhrol Rasyid, C.SE., dan Afifa Fadhila Tamrin, SE. selaku pembimbing.
- Get Rich

Makassar, 10 Juni 2015

Penulis

ABSTRAK

Analisis Efektifitas dan Potensi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar Periode 2009-2013

Muthia Nurfitriani Ramlan

Sri Undai Nurbayani

Bakhtiar Mustari

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui efektifitas retribusi pedagang kaki lima di Kota Makassar, (2) mengetahui dan menganalisis seberapa besar kontribusi retribusi pedagang kaki lima terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar, (3) mengetahui dan menganalisis seberapa besar potensi retribusi pedagang kaki lima di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Makassar dengan memanfaatkan data yang tersedia di perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar. Penelitian ini mencakup tingkat efektifitas dan potensi retribusi pedagang kaki lima terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar. Adapun variabel-variabel yang digunakan adalah efektifitas, kontribusi, potensi, jumlah pengguna, dan tarif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas retribusi pedagang kaki lima di Kota Makassar bersifat sangat efektif, kontribusi retribusi pedagang kaki lima terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar termasuk dalam kategori rendah. Prediksi potensi retribusi pedagang kaki lima di Kota Makassar memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya.

Kata kunci: Efektifitas, kontribusi, potensi, retribusi, dan PAD

ABSTRACT

The Analysis of Effectivity and Potential Cadger Retribution to District Own Source Revenue (PAD) in Makassar City 2009-2013

Muthia Nurfitriani Ramlan

Sri Undai Nurbayani

Bakhtiar Mustari

This study aims to (1) understand the effectiveness of cadgers retribution in Makassar city, (2) understand and analyze how much the contribution of cadgers retribution discrit own source revenue (PAD) in Makassar City , (3) understand and analyze how much the potential of cadgers retribution in Makassar city. This study is conducted in Makassar city region using available data in company region market Makassar Raya (PD. Pasar Makassar Raya) Makassar city. This study embody the level of effectiveness and potential cadgers retribution to discrit own source revenue (PAD) in Makassar city. As for variables that be used is effectiveness, contribution, potential, amount of users, and tariff.

Result of study suggest that the effectiveness of cadgers retribution in Makassar city tend to high effective, the contribution of cadgers retribution to discrit own source revenue (PAD) in Makassar city is in low category. Prediction of potential cadgers retribution in Makassar city has tend to increasing every year.

Key words: Effectivity, contribution, potential, retribution, and discrit own source revenue.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Teoritis.....	8
2.1.1 Konsep Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	8
2.1.1.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	8
2.1.1.2 Keuangan Daerah	9
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.1.3 Pajak.....	15
2.1.4 Retribusi Daerah	17
2.1.4.1 Definisi Retribusi Daerah	17
2.1.4.2 Klasifikasi Retribusi Daerah	19
2.1.5 Pedagang Kaki Lima Sebagai Bagian dari Usaha Kecil di Sektor Informal	20
2.1.6 Potensi dan Efektifitas.....	27
2.1.6.1 Efektifitas.....	27
2.1.6.2 Potensi	28
2.2 Tinjauan Empiris	29
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Lokasi Penelitian.....	31
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4 Metode Analisis.....	32
3.4.1 Perhitungan Potensi Retribusi Pedagang Kaki Lima	32
3.4.2 Perhitungan Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap PAD	32
3.4.3 Perhitungan Efektifitas Retribusi Pedagang Kaki Lima	33
3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	34

BAB IV PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	35
4.1.1 Keadaan Geografis	35
4.1.2 Luas Wilayah	36
4.1.3 Keadaan Penduduk	36
4.1.4 Keadaan Ekonomi	37
4.2 Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima	39
4.3 Gambaran Umum PD. Pasar Makassar Raya	41
4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Utama PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar	41
4.3.2 Susunan Organisasi PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar	42
4.4 Perkembangan Variabel Penelitian	42
4.4.1 Perkembangan PAD. Di Kota Makassar Periode 2009-2013	42
4.4.2 Perkembangan Realisasi Retribusi Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar Periode 2009-2013.....	44
4.4.3 Perkembangan Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar dan Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar di Kota Makassar Tahun 2009-2013	45
4.4.3.1 Perkembangan Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar 2009-2013.....	46
4.4.3.2 Perkembangan Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar di Kota Makassar Tahun 2009-2013	46
4.5 Analisis Data	49
4.5.1 Target dan Realisasi	49
4.5.1.1 Target dan Realisasi Retribusi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar	49
4.5.1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Makassar.....	53
4.5.1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar	56
4.5.1.4 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Makassar	59
4.5.2 Tingkat Efektifitas Retribusi Pedagang Kaki Lima.....	61
4.5.3 Kontribusi	63
4.5.3.1 Kontribusi Realisasi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Retribusi Pasar	63
4.5.3.2 Kontribusi Realisasi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Retribusi Daerah.....	65
4.5.3.3 Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pendapatan Asli Daerah	68
4.5.3.4 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Makassar	71
4.5.4 Prediksi Potensi Retribusi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar	73

BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar Tahun 2009-2014.....	4
Tabel 4.1 Target dan Realisasi APBD di Kota Makassar Tahun 2010-2012.....	37
Tabel 4.2 Target dan Realisasi PAD di Kota Makassar Tahun 2010-2012.....	38
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kota Makassar Tahun 2010-2012.....	38
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Retribusi Daerah di Kota Makassar Tahun 2010-2012.....	39
Tabel 4.5 Perkembangan Realisasi PAD Kota Makassar Tahun 2009-2013.....	43
Tabel 4.6 Perkembangan Realisasi Retribusi Pedagang Kaki Lima Tahun 2009-2013.....	44
Tabel 4.7 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar Tahun 2009-2013.....	46
Tabel 4.8 Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar di Kota Makassar Tahun 2009-2013.....	48
Tabel 4.9 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima Kota Makassar Tahun 2009-2013.....	50
Tabel 4.10 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Makassar Tahun 2009-2013	53
Tabel 4.11 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar Tahun 2009-2013	56
Tabel 4.12 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Makassar Tahun 2009-2013.....	59
Tabel 4.13 Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Retribusi Pasar Tahun 2009-2013.....	63
Tabel 4.14 Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2009-2013	66

Tabel 4.15	Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap PAD Tahun 2009-2013.....	69
Tabel 4.16	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Tahun 2009-2013	71
Tabel 4.17	Estimasi Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar Di Kota Makassar Tahun 2009-2017	75
Tabel 4.18	Hasil Estimasi Potensi Retribusi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar Di Kota Makassar Tahun 2014-2017.	77
Tabel 4.19	Kontribusi Realisasi Sumber-Sumber PAD Terhadap Total PAD Kota Makassar Tahun Anggaran 2013.....	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima Kota Makassar Tahun 2009-2013.....	52
Gambar 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Makassar Tahun 2009-2013.....	55
Gambar 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar Tahun 2009-2013.....	58
Gambar 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Makassar Tahun 2009-2013.....	60
Gambar 4.5 Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Retribusi Pasar Tahun 2009-2013.....	64
Gambar 4.6 Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2009-2013	67
Gambar 4.7 Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap PAD Tahun 2009-2013.....	70
Gambar 4.8 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2009-2013.....	72
Gambar 4.9 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar Tahun 2009-2013.....	76
Gambar 4.10 Hasil Estimasi Retribusi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar Tahun 2009-2017.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Data Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar Di Kota Makassar Tahun 2009-2013 87
Lampiran 2	Rincian Realisasi Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar Di Kota Makassar Tahun 2009 88
Lampiran 3	Rincian Realisasi Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar Di Kota Makassar Tahun 2010 89
Lampiran 4	Rincian Realisasi Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar Di Kota Makassar Tahun 2011 90
Lampiran 5	Rincian Realisasi Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar Di Kota Makassar Tahun 2012 91
Lampiran 6	Rincian Realisasi Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar Di Kota Makassar Tahun 2013 92
Lampiran 7	Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 93
Lampiran 8	Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2010 94
Lampiran 9	Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 95
Lampiran 10	Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2012 96
Lampiran 11	Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 97
Lampiran 11	Surat Bukti Penelitian 98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah dapat diartikan sebagai kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan sentralistis dan pendekatan desentralistis. Pendekatan desentralistis mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang daerah dan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah secara otonom. Pembangunan daerah melalui desentralisasi atau otonomi daerah memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik di daerah. Artinya pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efisien, parsipatif, terbuka dan akuntabel (Slyvasari, 2004)

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan suatu daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dan melakukan identifikasi potensi-potensi sumber pendapatan dan mampu menetapkan pembelanjaan daerah secara ekonomi yang wajar, efektif dan efisien. Pembangunan daerah melalui otonomi juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal atau setempat sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju dan tentram. Sehubungan dengan biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh pemerintah daerah melalui anggaran

pendapatan belanja daerah (APBD), maka penyerahan kewenangan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah haruslah disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, disamping itu didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi, kabupaten/kota (Nurhani, 2000).

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ditunjukkan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, pembiayaan, penyelenggaraan pemerintah di daerah serta pembangunan daerah dengan berlandaskan hukum dan aspirasi dari masyarakat. Usaha pemerintah untuk meningkatkan peranan sumber pendapatan asli daerah dan kemampuan daerah dalam bidang ekonomi keuangan telah lama dicanangkan dan dimulai sejak pelita I, kebijakan ini nampaknya merupakan salah satu cermin dari usaha untuk menciptakan daerah yang lebih otonom tanpa mengabaikan pentingnya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya di maksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintah pada umumnya (Insukindro dkk, 1994).

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial guna tetap menjaga kesinambungan didaerah adalah retribusi daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaannya perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah agar hasil yang diharapkan dari retribusi dapat mencapai target. Retribusi merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup potensial didaerah, maka pelaksanaan dalam mengelolanya perlu dikembangkan secara efisien dan efektif. Masalah itu bukan hanya merupakan masalah pemerintah dalam hal ini

dinas pendapatan daerah saja, tetapi merupakan masalah kita semua yang erat kaitannya dengan upaya pemupukan dana untuk membiayai pengeluaran pembangunan daerah (Santoso, 1995).

Dari beberapa jenis retribusi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota, salah satu jenis komponen dari retribusi daerah yang memberi kontribusi dalam menunjang sumber dana yang dibutuhkan dalam pembiayaan pembangunan di daerah adalah retribusi pedagang kaki lima. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pedagang kaki lima sebagai salah satu komponen dari retribusi daerah bukan semata-mata sebagai pengisi kas daerah, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan daerah (Tarigan, 2012)

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk unit usaha informal yang bernilai bagi pemasukan dari sektor pendapatan asli daerah yaitu retribusi yang berguna untuk mendukung penguatan otonomi daerah di Kota Makassar. Kontribusi yang diberikan pedagang kaki lima melalui retribusi cukup besar, hal itu diketahui dari terpenuhinya target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar.

Pungutan retribusi mengurangi penghasilan dan kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin daerah dan pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat baik yang membayar ataupun yang tidak membayar retribusi.

Retribusi ini merupakan bagian dari pajak yang secara nyata dapat membiayai kepentingan masyarakat. Pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud

untuk membiayai pengeluaran negara, yang dikatakan bahwa dalam hal ini pajak mempunyai fungsi budgeter.

Dengan adanya krisis ekonomi dan moneter, maka terjadi kelumpuhan ekonomi nasional terutama di sektor riil yang berakibat terjadinya PHK besar-besaran dari perusahaan-perusahaan swasta Nasional. Hal ini berujung pada munculnya pengangguran di kota-kota besar, termasuk Kota Makassar sebagai obyek penelitian ini.

Sebagaimana di kota-kota besar lainnya, Kota Makassar yang merupakan kota perdagangan adalah wajar apabila para pengangguran melakukan kompensasi positif dengan memilih bekerja di sektor informal. Salah satu sektor informal yang banyak diminati para pengangguran (selain yang sudah lama bekerja di sektor ini) yaitu pedagang kaki lima. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pedagang kaki lima di Kota Makassar yang meningkat setiap tahun.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar Tahun 2009-2014

No	Tahun	Jumlah Pedagang Kaki Lima	Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (%)
1	2009	3.405	-
2	2010	3.590	5.4
3	2011	3.501	(0.2)
4	2012	3.752	7.1
5	2013	3.951	5.3
6	2014	4.443	12.4

Sumber : PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar tahun 2009-2014 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah pedagang kaki lima di Kota Makassar setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan yang semakin besar. Hal ini merupakan indikasi bahwa realisasi

retribusi pedagang kaki lima juga akan semakin meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa potensi penarikan retribusi pada pedagang kaki lima kedepannya akan semakin besar. Namun, dibalik bertambahnya jumlah pedagang kaki lima serta besarnya potensi yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa banyak tenaga kerja di Kota Makassar yang memilih bekerja menjadi pedagang kaki lima dalam sektor informal.

Pedagang kaki lima sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Bahkan pedagang kaki lima, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Salah satu hal yang harus dilihat dan dipertanyakan, apakah penentuan target retribusi pedagang kaki lima selama ini sudah sesuai dengan potensi pedagang kaki lima yang ada di kota Makassar? Karena retribusi pedagang kaki lima merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial sehingga harus digali secara optimal sehingga penerimaan retribusi pedagang kaki lima yang dipungut dari pedagang kaki lima dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai penelitian dengan judul: "*Analisis*

Efektifitas dan Potensi Retribusi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar Periode 2009-2013”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa efektif retribusi pedagang kaki lima terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar selama periode 2009-2013?
2. Seberapa besar kontribusi retribusi pedagang kaki lima terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar selama periode 2009-2013?
3. Seberapa besar potensi retribusi pedagang kaki lima di Kota Makassar selama periode 2009-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektifitas retribusi pedagang kaki lima di Kota Makassar selama periode 2009-2013.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar kontribusi retribusi pedagang kaki lima terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar selama periode 2009-2013.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar potensi retribusi pedagang kaki lima di Kota Makassar selama periode 2009-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara ilmiah sebagai referensi dan bahan pertimbangan dari penelitian dan pengembangan konseptual dalam hal yang berkaitan dengan permasalahan retribusi pedagang kaki lima.

2. Secara praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Makassar dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan rencana penerimaan retribusi pedagang kaki lima di masa yang akan datang sebagai sumber pendapatan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Konsep Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2.1.1.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Halim (2004), APBD adalah suatu anggaran daerah, dimana memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (a) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci, (b) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang akan dilaksanakan, (c) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka (d) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 tahun.

Menurut Halim dan Nasir (2006), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Keputusan Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, APBD terdiri atas 3 bagian, yakni : pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeriksaan, serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggung jawaban APBD. Pertanggung jawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada menteri dalam negeri untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintah Daerah Tingkat II, jadi pertanggung jawaban bersifat vertikal.

2.1.1.2 Keuangan Daerah

Ketentuan mengenai keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 4 ayat (1), UU Nomor 33 Tahun 2004, ditegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Artinya, dana APBD diperuntukan bagi pelaksanaan tugas pemerintah daerah, termasuk tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintah yang sudah dilimpahkan c yang sudah didesentralisasikan pusat ke daerah. Penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah. Sebaiknya, pengurangan wewenang akan mengurangi anggaran untuk itu. Selamaini pelaksanaan pemerintah di daerah sebagian besar dibiayai oleh pusat melalui bantuan pusat atau subsidi daerah otonom.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan, pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dalam pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja idak mungkin bagi daerah untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hialng.untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula.

Menurut Mamesh dalam Halim (2004), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keuangan daerah memiliki lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Jadi manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Manajemen keuangan daerah pengelolaannya terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, dan kepengurusan khusus berkaitan dengan barang-barang inventaris kekayaan daerah. Manajemen keuangan daerah juga dapat pula dilihat dari segi tata usaha atau administrasi keuangan daerah (Halim, 2004).

Keuangan daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak dari keuangan daerah yang besumber dari penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, ataupun hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain.

Hak-hak tersebut akan meningkatkan keuangan daerah. Kewajiban dari keuangan daerah yakni semua kewajiban mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Adapun sumber-sumber penerimaan daerah yang lain terdiri dari:

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonom kepada daerah. Dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang dialokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam Pasal 10 UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana perimbangan terdiri dari: (a) Dana bagi hasil, (b) Dana alokasi umum, (c) Dana alokasi khusus

2. Pinjaman Daerah

Sumber utama pinjaman daerah berasal dari pinjaman dalam negeri. Jumlah pinjaman daerah selama ini rata-rata dibawah satu persen (1%) dari APBN, itu pun pinjaman yang dilakukan sebagian besar untuk mendukung kegiatan atau operasional perusahaan daerah (Badan Usaha Milik Daerah). Pemerintah daerah pada masa lalu tidak dibenarkan melakukan pinjaman luar negeri.

3. Lain-lain penerimaan yang sah

Pendapatan lain-lain yang sah merupakan pendapatan yang didapat berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan daerah yang makmur, adil, dan sejahtera merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dibutuhkan pembiayaan yang jumlahnya tidaklah sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan daerah sehingga pada akhirnya pemerintah daerah tidak lagi tergantung pada subsidi dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan yang potensial bagi pembangunan (Saragih, 1996).

Menurut Soemitro (1977), pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang merupakan pendapatan yang diterima sebagai balas jasa oleh golongan-golongan yang merupakan faktor-faktor produksi. Selanjutnya Poerwadarminta (1995), mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil pencarian (usaha dan sebagainya) atau perolehan atau sesuatu yang didapatkan yang sedianya belum ada. Suparmoko (1982), berpendapat bahwa penerimaan pemerintah dapat diartikan sebagai penerimaan dalam arti yang seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan yang diperoleh dari hasil-hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah.

Kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh tersedianya sumber-sumber pajak (*tax objects*) dan tingkat hasil dari objek tersebut, tingkat hasil tersebut ditentukan oleh sejauh mana sumber pajak (*tax bases*) responsif terhadap kekuatan yang mempengaruhi objek pengeluaran seperti inflasi, penambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan tingkat pelayanan baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Devas, 1989).

Kaho (1988), berpendapat bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya faktor keuangan daerah lebih dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya Kaho mengemukakan bahwa uang adalah alat untuk mengukur uang dan jasa, alat untuk menukar barang dan jasa dan alat penabung. Selain sebagai alat pengukur, penukar dan penabung. Uang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga. Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Posisi keuangan memiliki posisi yang sangat penting artinya sebagai alat penyelenggara otonomi daerah, maka oleh karena itu tanpa pengelolaan yang memadai, pemerintah daerah tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Kaho, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Widjaya (1972), pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam, mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah

guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang merupakan hasil usaha sendiri dalam mendapatkan pembangunan untuk memperkecil ketergantungan terhadap subsidi pemerintah pusat dan tingkat satu. Sebagai pendapatan asli daerah yang penting dan strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah dituntut untuk selalu mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah yang merupakan cermin dari keikutsertaan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (Widjaya, 1972).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 79 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 UU 22/1999 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 (pasal 157) tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah: (a) Pajak daerah: pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, (b) Retribusi: pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi

daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, (c) Perusahaan milik daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan memupuk pendapatan yang bertujuan untuk turutserta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur, (d) Pendapatan daerah yang sah, pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Devas (1989), bahwa: kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

2.1.3 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jendral yang ada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Menurut Andriani (2004), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Sommerfel (1996), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi pemerintah sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

2.1.4 Retribusi Daerah

2.1.4.1 Definisi Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial. Retribusi daerah merupakan jenis pendapatan yang dipungut berdasarkan balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Disamping itu, pelaksanaan pungutan retribusi daerah dapat dilakukan seluas-luasnya tanpa ada batasan yang ketat dari pemerintah pusat, sepanjang pemerintah daerah dapat menyediakan jasa untuk mengadakan pungutan.

Sejalan dengan hal itu, maka Widjaya (1972) mengemukakan bahwa retribusi merupakan harga dari suatu pelayanan langsung dari pemerintah daerah dengan memperhatikan kualitas pelayanannya yang harus baik dan perlu ditingkatkan sesuai besarnya retribusi yang ditarik. Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis jasa tertentu menurut pertimbangan sosial atau ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi.

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dengan demikian, retribusi daerah merupakan pendapatan atau pungutan daerah sebagai pembiayaan atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung kepada objek retribusi.

Suparmoko (1982), mengemukakan bahwa retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya

hubungan antara saja langsung yang diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Selanjutnya Kunardjo (1996), berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, (1) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, (2) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, (3) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 Angka 64 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

Dengan melihat pendapat yang telah dikemukakan diatas, nampak bahwa retribusi mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut: retribusi dipungut negara, adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis, retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh negara, yang

pembayarannya dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Jadi jelas, bahwa para objek retribusi mendapat jasa langsung dari negara, orang-orang yang tidak menggunakan jasa objek retribusi pemerintah yang telah disediakan tidak diwajibkan membayar retribusi. Retribusi ini berdasarkan atas peraturan yang berlaku, yakni dalam bentuk peraturan daerah dan untuk mentaatinya yang berkepentingan mendapat paksaan ekonomi yaitu barang siapa yang ingin menggunakan/mendapatkan jasa tertentu dari pemerintah maka ia wajib membayarnya. Pembayaran inilah yang disebut retribusi (Astuti, 2006).

2.1.4.2 Klasifikasi Retribusi Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah terdiri dari : (a) Retribusi jasa umum: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, (b) Retribusi jasa usaha: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air; dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Slamet (1999), menyatakan bahwa beberapa hal yang ikut melatarbelakangi keberadaan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah dapat dilihat dari berbagai sudut, antara lain: (a) Dari sudut administrasi: pemungutan retribusi daerah berdasarkan pengalaman yang berlaku selama ini bersifat lebih sederhana, mudah dan cepat terhimpun, yang diberikan kepada daerah dan yang dibutuhkan oleh daerah. Hal ini karena umumnya terkait pada pelayanan yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat sesuai dengan permohonannya, (b) Dari sudut perkembangan ekonomi: perkembangan ekonomi yang lebih pesat jelas membawa dampak yang lebih baik pula pada kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang lebih baik jelas akan menimbulkan kebutuhan yang lebih meningkat. Ini berarti memerlukan pelayanan yang lebih baik pula. Dari sinilah dapat digali sumber pendapatan berupa retribusi maupun pungutan bukan pajak lainnya.

Batasan pengertian penerimaan retribusi daerah selanjutnya disebut retribusi adalah realisasi keseluruhan unit-unit pendapatan dari sumber pungutan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5 Pedagang Kaki Lima Sebagai Bagian Dari Usaha Kecil Di Sektor Informal

Menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

Adapun usaha kecil tersebut meliputi : usaha kecil formal, usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil formal adalah usaha yang telah

terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum, sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya.

Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 juga ditetapkan beberapa kriteria usaha kecil, antara lain: (a) memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 (satu) milyar rupiah, (c) milik warga negara Indonesia, (d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, (e) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha kaki lima adalah bagian dari Kelompok usaha kecil yang bergerak disektor informal, yang oleh istilah dalam undang-undang No. 9 Tahun 1995 dikenal dengan istilah pedagang kaki lima.

Konsepsi sektor informal mendapat sambutan yang sangat luas secara internasional dari para pakar ekonomi pembangunan, sehingga mendorong dikembangkannya penelitian pada beberapa negara berkembang termasuk Indonesia oleh berbagai lembaga penelitian pemerintah, swasta, swadaya masyarakat dan universitas. Hal tersebut terjadi akibat adanya pergeseran arah pembangunan ekonomi yang tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi makro semata, akan tetapi lebih kearah pemerataan pendapat.

Tarigan (2012), mengatakan bahwa adanya sektor informal bukan sekedar karena kurangnya lapangan pekerjaan, apalagi menampung lapangan kerja yang terbuang dari sektor informal akan tetapi sektor informal adalah sebagai pilar bagi keseluruhan ekonomi sektor formal yang terbukti tidak efisien. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sektor informal telah banyak mensubsidi sektor formal, disamping sektor informal merupakan sektor yang efisien karena mampu menyediakan kehidupan murah.

Konsepsi ekonomi sektor informal baru muncul dan terus dikembangkan sejak tahun 1969 pada saat *International Labor Organization (ILO)* mengembangkan program *World Employment Programme (WEP)*. Program bertujuan untuk mencari strategi pembangunan ekonomi yang tepat, yang mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan di dunia ketiga (negara berkembang), sebagai akibat adanya suatu kenyataan bahwa meskipun membangun ekonomi telah dipacu namun tingkat pengangguran di negara berkembang tetap tinggi. Melalui program tersebut telah dilakukan penelitian tentang ketenagakerjaan di Colombia, Sri Lanka dan Kenya.

Tahun 1972, *International Labor Organization (ILO)* menerbitkan laporan hasil penelitian ketenagakerjaan di Kenya, yang antara lain menyimpulkan bahwa inti permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Kenya bukanlah pengangguran semata, melainkan juga akibat banyaknya pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang memadai (dibawah garis kemiskinan), serta rendahnya tingkat produktivitas dan pemanfaatan (*under utilization*) tenaga kerja.

Kondisi yang demikian *International Labor Organization (ILO)* menemukan adanya kegiatan ekonomi yang selama ini lolos dari pencacahan, pengaturan dan perlindungan pemerintah, tetapi yang mempunyai makna ekonomi dengan -

karakteristik kompetitif, padat karya, memakai input dan teknologi lokal, serta beroperasi atas dasar pemilikan sendiri oleh masyarakat lokal. Kegiatan-kegiatan seperti inilah yang kemudian dinobatkan sebagai sektor informal.

Sektor informal itu sendiri, pertama kali diperkenalkan Keith Hart seorang peneliti dari Universitas Manchester di Inggris. Lebih lanjut, Harmono pada tahun 1983 kemudian muncul dalam penerbitan ILO (1972) sebagaimana disebutkan di atas. Lebih lanjut ILO dalam Sudarsono memberikan definisi tentang sektor informal sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pengusaha pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya dan teknologi yang disesuaikan dengan keterampilan yang dibutuhkan, tidak diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar dengan penuh persaingan.

Sethurahman memberi batasan sektor informal ini sebagai unit-unit usaha berskala kecil yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang-barang, dimasuki oleh penduduk kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan dari pada memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut Moser, bahwa sektor informal merupakan kegiatan ekonomi yang selama ini lolos dari pencacahan, pengaturan dan perlindungan pemerintah, tetapi mempunyai makna ekonomi dengan karakteristik kompetitif, padat karya, memakai input dan teknologi lokal, serta beroperasi atas dasar pemilikan sendiri oleh masyarakat lokal.

Kenyatannya dasar dari suatu kegiatan sektor informal harus memiliki suatu lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan (*profit*) yang lebih banyak dari tempat lain dan untuk mencapai keuntungan, penentuan lokasi yang memaksimalkan penerimaan biasanya diambil bila memenuhi kriteria-kriteria pokok : (a) Tempat yang memberi kemungkinan pertumbuhan jangka panjang

yang menghasilkan keuntungan yang layak, (b) Tempat yang luas lingkungannya untuk kemungkinan perluasan unit produksi. Jadi jelasnya bahwa pengertian sektor informal mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, artinya bahwa kegiatan yang paling besar dijalankan oleh penduduk berpendapatan rendah.

Indonesia telah mempunyai kesepakatan tentang 11 ciri pokok sektor informal sebagai berikut: (a) Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal, (b) Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha, (c) Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja, (d) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak sampai ke pedagang kaki lima, (e) Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub-sektor ke lain sub-sektor, (f) Teknologi yang digunakan bersifat primitif, (g) Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil, (h) Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sambil bekerja, (i) Sumber dana modal usaha yang umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak resmi, dan (j) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat desa-kota berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah.

Secara umum, pedagang dapat diartikan sebagai penyalur barang dan jasa-jasa perkotaan. Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas.

Bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-

golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu. Pengertian/ batasan tentang pedagang kaki lima sebagaimana dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal. Secara khusus, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai distribusi barang dan jasa yang belum memiliki ijin usaha dan biasanya berpindah-pindah.

Menurut Tarigan (2012), bahwa istilah pedagang kaki lima biasanya untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, tetapi akan menyesatkan bila disebut dengan “perusahaan” berskala kecil karena beberapa alasan, antara lain : (a) Mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan rendah (kebanyakan para migran), (b) Jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukanlah pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya, dan (c) Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan yang langsung bagi dirinya sendiri.

Pedagang kaki lima di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evaluasi dari pada dianggap sebagai perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (input) modal dan pengolahan yang besar.

Selanjutnya menurut definisi International Labour Organization (ILO), pedagang kaki lima didefinisikan sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya, keterampilan

yang dibutuhkan diperoleh di luar bangku sekolah, tidak dapat diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar persaingan penuh.

Menurut Wirosardjono (1999), pengertian pedagang kaki lima adalah kegiatan sektor marginal (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri sebagai berikut : (a) Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimaannya, (b) Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikategorikan “liar”), (c) Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian, (d) Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu, (e) Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-usaha yang lain, (f) Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, (g) Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja, (h) Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama, dan (i) Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya.

Untuk saluran arus barang dan jasa, pedagang kaki lima merupakan mata rantai akhir sebelum mencapai konsumen dari satu mata rantai yang panjang dari sumber utamanya yaitu produsennya. Berdasarkan barang atau jasa yang diperdagangkan, pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut : (a) Pedagang minuman dan makanan, (b) Pedagang ayam, kambing, dan burung, (c) Pedagang sayur-sayuran dan buah-buahan, (d) Pedagang daging dan ikan, (e) Pedagang rokok dan obat-obatan, (f) Pedagang onderdil kendaraan, (g) Pedagang, (h) Pedagang Loak, (i) Pedagang buku, majalah dan surat kabar, (j) Beras, (k) Pedagang, dan (l) Penjual jasa dan lain sebagainya.

2.1.6 Potensi dan Efektifitas

2.1.6.1 Efektifitas

Efektifitas pelaksanaan suatu program ditandai dengan pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu efektifitas diartikan sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran ini menunjukkan tingkat keefektifan (Gibson, 1989).

Terdapat tiga pandangan terhadap efektifitas. Pandangan pertama, efektifitas individu yaitu potensi kerja individu dinilai secara rutin lewat proses evaluasi hasil kerja yang merupakan dasar bagi kenaikan gaji, promosi, dan imbalan lain yang tersedia dalam organisasi. Pandangan kedua adalah efektifitas kelompok, yaitu jumlah kontribusi dari semua anggotanya, misalnya bagi kelompok ilmuwan yang mengerjakan proyek individu yang tidak saling berhubungan, maka besarnya efektifitas sama dengan jumlah efektifitas dari tiap-tiap individu. Dalam beberapa hal, efektifitas kelompok lebih besar dari jumlah kontribusi tiap-tiap individu. Pandangan ketiga adalah efektifitas organisasi terdiri atas individu dan kelompok, yang mana efektifitas organisasi mampu mendapatkan hasil karya dari tiap bagian-bagian lainnya (Lubis dan Huseini, 1987).

Menurut Jones (1995), efektifitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan sehingga efektifitas hanya berkepentingan dengan keluaran. Sedangkan menurut Suadi (1997), efektifitas adalah perbandingan antara keluaran dan tujuan. Oleh karenanya, suatu tujuan dinyatakan secara spesifik dan rinci sehingga pengukuran efektifitas dapat lebih bermanfaat dan bermakna. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan

antara pungutan retribusi pasar terhadap potensi pasar yang bersangkutan (Devas, 1989).

Dalam perhitungan efektifitas, apabila hasilnya menunjukkan persentase yang semakin besar dapat diartikan bahwa pengelolaan retribusi semakin efektif. Demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pengelolaan retribusi semakin tidak efektif. Perhitungan efektifitas digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah *Charge Performance Index* (CPI) yaitu perbandingan antara realisasi retribusi pasar dengan sasaran atau target penerimaan retribusi pasar yang direncanakan.

2.1.6.2 Potensi

Menurut Foda dan Sullivan (1995), potensi adalah kemampuan yang terdiri dari *ability* (kecakapan, bakat dan kemampuan), *capability* (kesanggupan), *competence* (kecakapan, kemampuan dan wewenang), *skill* (kepandaian), dan *talent* (bakat dan pembawaan). Hal senada juga dikemukakan oleh Salim (1991), yang menyebutkan bahwa potensi merupakan kemampuan, kekuatan dan daya.

Menurut Harun (1994), dalam bukunya menghitung potensi pajak dan retribusi daerah, mengemukakan bahwa analisis perhitungan mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target nasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan perkiraan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan kita dapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan kita lakukan untuk menggali potensi terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Menurut Triatmoko (2001), secara umum potensi dapat dikatakan sebagai kesanggupan organisasi atau badan dalam upaya melaksanakan atau menghasilkan sesuatu, dengan mengadopsi formulasi perhitungan potensi penerimaan pasar. Penelitian tentang perhitungan potensi pajak dan retribusi yang dilakukan oleh Mardiasmo dan Makhfatih (2000), mengemukakan modal untuk menghitung efisiensi adalah mengukur bagian dari pajak atau retribusi yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak atau retribusi yang bersangkutan. efektifitas mengukur perbandingan antara hasil pemungutan pajak atau retribusi dengan potensi pajak atau retribusi.

2.2 Tinjauan Empiris

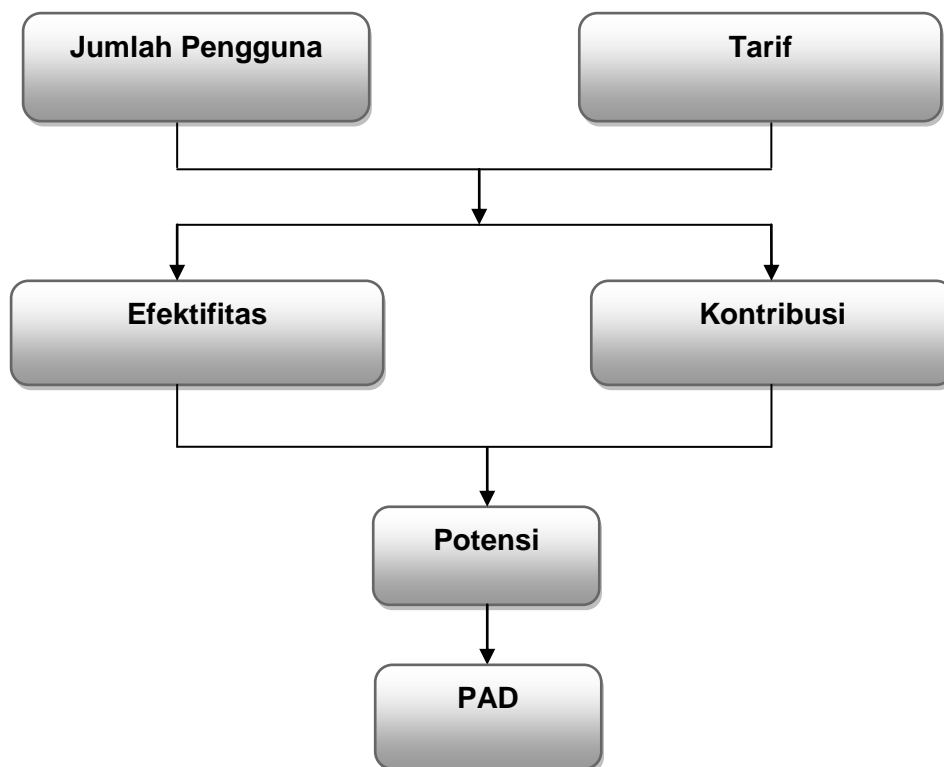
Santoso (1995), meneliti tentang *peranan retribusi pasar sebagai pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman*. Aspek yang dikaji adalah tentang elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB dan jumlah penduduk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa retribusi pasar memberikan pengaruh yang cukup tinggi terhadap PDRB dan jumlah penduduk.

Astuti (2001), menulis tentang *analisis retribusi pasar dalam pendapatan asli daerah kota makassar (khusus pasar regional daya)*, diperoleh hasil penelitian bahwa retribusi pasar regional daya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kota Makassar selama tahun anggaran 2001/2002 hingga tahun anggaran 2005/2006 rata-rata realisasi penerimaan setiap tahunnya adalah 21,3%. Adapun kontribusi pasar regional daya terhadap retribusi pasar tahun nggaran 2001/2002 sampai tahun anggaran 2005/2006 rata-rata 16,7%, sedangkan retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kota Makassar selama 5 tahun terakhir ini rata-rata 5,1%.

Tarigan (2012), menulis tentang *perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Deli Serdang: studi atas Perda no. 3 tahun 2000 tentang retribusi pasar*. Aspek yang dikaji adalah tentang perlindungan bagi usaha dan kontribusi pedagang kaki lima terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa pedagang kaki lima memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Bagan kerangka konseptual analisis retribusi pedagang kaki lima terhadap PAD



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Makassar dengan memanfaatkan data yang tersedia di Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD)..

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan tempat objek yang akan diteliti dan informasi dari hasil wawancara langsung.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan kajian buku-buku serta literature yang berhubungan dengan pembahasan dan mempunyai relevansi.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, dengan menggunakan data *Time Series* yang merupakan data selama periode 5 tahun (2009-2013) dan data primer berupa hasil wawancara langsung dengan para pedagang di lapangan. Dalam hal ini sumber data yang digunakan yaitu data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD), Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar berupa data target dan realisasi penerimaan retribusi pedagang kaki lima Kota Makassar tahun anggaran 2009-2013, target dan realisasi penerimaan retribusi daerah Kota

Makassar tahun anggaran 2009-2013, target dan realisasi PAD Kota Makassar tahun anggaran 2009-2013. Selain itu digunakan juga studi kepustakaan, yaitu informasi yang diperoleh melalui beberapa literatur dan artikel yang dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan pokok penelitian.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Perhitungan Potensi Retribusi Pedagang Kaki Lima

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. Cara menghitung potensi retribusi pedagang kaki lima adalah sebagai berikut (Prakosa, 2005):

$$Pr = (Jpkl) \times (Tr) \times (t), \text{ dimana:}$$

Pr = Potensi retribusi pedagang kaki lima (Rp)

Jf = Jumlah pedagang Kaki Lima

Tr = Tarif retribusi pedagang Kaki Lima (Rp)

t = Waktu Pemungutan (Hari)

3.4.2 Perhitungan Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap PAD

Kontribusi retribusi adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan retribusi terhadap total PAD. Rumusnya adalah sebagai berikut (Nurdjaman, 1992):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi tahun ke - } n}{\text{Penerimaan PAD tahun ke - } n} \times 100\%$$

Semakin besar nilai retribusi daerah berarti semakin besar pula tingkat kontribusi retribusi terhadap PAD. Dimana bila kontribusi retribusi daerah semakin tinggi maka PAD akan meningkat dan sebaliknya. Apabila terjadi hal sebaliknya dimana kontribusi daerah turun maka perlu usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui retribusi daerah.

3.4.3. Perhitungan Efektifitas Retribusi Pedagang Kaki Lima

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dari penerimaan retribusi pedagang kaki lima di kota Makassar dipergunakan formulasi (Mangkusoebroto, 1993):

$$CPI = \frac{Rm}{Tm} \cdot 100\%, \text{ dimana:}$$

CPI = Change Performance Index/tingkat efektifitas retribusi pedagang kaki lima (%)

Rm = Realitation of Market Retribution/realisasi retribusi pedagang kaki lima

Tm = Target of Market Retribution/ target retribusi pedagang kaki lima

Hasil perhitungan tersebut, kemudian disesuaikan dengan ranking efektifitas sebagai berikut:

81% - 100% = dikategorikan *sangat efektif*

61% - 80% = dikategorikan *efektif*

41% - 60% = dikategorikan *cukup efektif*

21% - 40% = dikategorikan *kurang efektif*

0% - 20% = dikategorikan *sangat kurang efektif*

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Efektifitas adalah ukuran tercapainya pemenuhan target penerimaan retribusi pedagang kaki lima berupa rasio antara penerimaan retribusi pedagang kaki lima dengan target penerimaan retribusi pedagang kaki lima yang dinyatakan dalam persen (%).
2. kontribusi retribusi pedagang kaki lima adalah presentase rasio antara retribusi pedagang kaki lima dengan total penerimaan PAD dalam satuan persen (%).
3. Potensi retribusi pedagang kaki lima adalah hasil kali dari jumlah pedagang kaki lima, dikalikan dengan tarif retribusi (Rupiah) dan waktu pemungutan (Hari).
4. Jumlah pengguna adalah jumlah keseluruhan pedagang kaki lima dalam satuan unit.
5. Tarif adalah satuan hitung yang dikenakan pada subjek retribusi pedagang kaki lima.
6. Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
7. Bidang usaha kecil yang belum terdaftar pada pemerintah daerah dan belum memiliki perlindungan hukum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Makassar

4.1.1 Keadaan Geografis

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi, dahulu disebut Ujung Pandang, yang terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan.

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada dipersimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Kota Makassar merupakan daerah pantai dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, Kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai *home base* pengelolaan produk produk *draft*

kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis, Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia.

4.1.2 Luas Wilayah

Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 Kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Kota Makassar yang mempunyai persentase luas wilayah tertinggi yaitu Kecamatan Biringkanaya dengan persentase 27,48%, kemudian Kecamatan Tamalanrea dengan persentase wilayah 18,15% dan Kecamatan Manggala dengan persentase 13,76%. Sedangkan luas wilayah dengan persentase terendah masing-masing yaitu Kecamatan Mariso dengan persentase wilayah 1,04%, Kecamatan Wajo dengan persentase 1,133% dan Kecamatan Bontoala dengan persentase wilayah 1,2%.

4.1.3 Keadaan Penduduk

Penduduk kota Makassar tahun 2009 adalah sebesar 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 jiwa laki-laki dan 662.079 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga di Kota Makassar tahun 2009 mencapai 296.374 rumah tangga. Dengan Kecamatan Tamalate memiliki posisi nomor satu untuk jumlah penduduk terbesar di Kota Makassar yakni sebanyak 154.464 jiwa pada tahun 2009. Sementara Kecamatan Rappocini menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk sebesar 145.090 jiwa pada tahun 2009, disusul oleh Kecamatan Tallo

dengan jumlah penduduk sebesar 137.333 rumah tangga. Kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga terbesar di Kota Makassar adalah Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah rumah tangga sebesar 35.684 rumah tangga, disusul dengan Kecamatan Tallo dengan jumlah rumah tangga sebesar 35.618 rumah tangga dan Kecamatan Tamalate terbesar ketiga dengan jumlah rumah tangga sebesar 32.904 rumah tangga. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil dan jumlah rumah tangga terkecil adalah Kecamatan Ujung Pandang dengan jumlah penduduk adalah sebesar 29.064 jiwa dan jumlah rumah tangganya adalah sebesar 7.177 rumah tangga.

4.1.4 Keadaan Ekonomi

Makassar mengalami berbagai peningkatan dari segi ekonomi dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2012. Kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kota Makassar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (31%), disusul oleh sektor industri pengolahan (26%), pertanian (17%), jasa-jasa (8%), transportasi dan komunikasi (6%), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (5%), konstruksi (3%), listrik, gas dan air bersih (3%) serta pertambangan dan penggalian (2%).

Tabel 4.1
Target dan Realisasi APBD Di Kota Makassar 2010 Hingga 2012

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2010	1.456.385.881.000	1.449.021.602.328	99,49
2011	1.737.319.712.000	1.721.199.904.891	99,07
2012	1.977.007.093.000	2.046.125.413.850	103,50

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD)

APBD Kota Makassar mengalami peningkatan dari Rp.1.449.021.602.328 pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.721.199.904.891 tahun 2011. Kemudian meningkat lagi menjadi Rp. 2,046.125.413.850 tahun 2012.

Tabel 4.2
Target Dan Realisasi PAD Di Kota Makassar Tahun 2010-2012

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2010	216.928.890.000	210.145.729.430	96,87
2011	345.335.311.000	345.350.562.825	100
2012	441.234.952.000	484.972.799.508	109,91

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar juga mengalami peningkatan dari Rp. 210.145.729.430 tahun 2010 menjadi Rp. 345.350.562.825 pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.484.972.799.508. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi PAD di kota Makassar mengalami trend yang cenderung meningkat.

Tabel 4.3
Target Dan Realisasi Pajak Daerah Di Kota Makassar Tahun 2010-2012

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2010	134.216.181.000	133.551.818.678	99,51
2011	260.486.460.000	270.547.821.316	103,86
2012	337.167.338.150	388.445.926.266	115,21

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD)

Pajak daerah Kota Makassar mengalami peningkatan dari Rp.133.551.818.678 tahun 2010 menjadi Rp. 270.547.821.316 pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.

388.445.926.266. Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa pajak daerah mendominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

Demikian juga pendapatan retribusi daerah Kota Makassar, meningkat dari Rp. 59.729.103.725 tahun 2010 menjadi Rp. 62.043.147.863 pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 69.257.410.559.

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Makassar Tahun 2010-2012

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2010	62.971.506.000	59.729.103.725	94,85
2011	66.549.806.000	62.043.147.863	93,23
2012	84.141.194.850	69.257.410.559	82,31

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD)

Walaupun target dan realisasi kecenderungan dari keduanya mengalami peningkatan, namun peningkatan target lebih tinggi daripada peningkatan realisasinya. Sehingga, rasio antara target retribusi dengan realisasi retribusi persentasenya mengalami penurunan.

4.2 Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari pelaku kegiatan perekonomian suatu daerah. Walaupun nilai retribusi pedagang kaki lima kecil, namun dengan jumlah pedagang kaki lima yang cukup banyak, maka diperkirakan kontribusinya terhadap total retribusi dan PAD juga besar.

Pedagang sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi atas dua yaitu pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang kecil adalah

pedagang yang menjual barang dagangan dengan modal yang kecil (*KBBI,2002:230*).

Menurut UU Nomor 29 Tahun 1948, Pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk di jual diserahkan, atau dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain. Pedagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi atas dua yaitu: pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang menjual barang dagangan dengan modal yang kecil (*KBBI, 2002:230*).

Menurut UU Nomor 29 Tahun 1948 , Pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk di jual diserahkan, atau dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masi berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain.

Sedangkan, Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pingir-pingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Dengan menggunakan pengertian diatas, maka retribusi pedagang kaki lima dimasukkan kedalam retribusi penggunaan kekayaan daerah. Karena para pedagang kaki lima dinilai sebagai pengguna fasilitas-fasilitas umum atau kekayaan negara berupa jalan, trotoar, taman-taman kota dan sebagainya.

4.3 Gambaran Umum Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya

Perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung untuk melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar, untuk itu perlu juga diketahui mengenai Visi dan Misi, Tupoksi, Struktur Organisasi, rincian tugas serta keadaan pegawai pada perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar.

Visi perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar yaitu "PASAR UNTUK SEMUA ". Visi ini didasari atas kondisi pasar yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar, persepsi pemerintah Kota dan pasar mengenai pasar yang ada dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, menuntut adanya strategi pemberdayaan pasar agar kinerja PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar meningkat di masa yang akan datang.

Strategi pemberdayaan pasar merupakan suatu sinergi dan mencakup strategi dibidang organisasi, fisik, pengelolaan dan strategi di bidang SDM. Demikian pula dari dimensi waktu strategi tersebut dapat berupa strategi jangka pendek, menengah dan panjang.

4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Utama PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar

- Tugas pokok PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina pedagang pasar, ikut memantapkan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar dan fasilitas perpasaran lainnya.
- Fungsi PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah melaksanakan pelayanan umum / jasa kepada masyarakat di bidang perpasaran.

4.3.2 Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar

Struktur organisasi dari PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar sesuai dengan peraturan walikota Makassar nomor 12 tahun 2006, terdiri dari :

- a. Badan Pengawas
- b. Direksi:
 - Direktur Utama
 - Direktur Umum
 - Direktur Teknik Operasional
- c. Satuan Pengawas Internal
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Unsur Staf:
 - Bagian Umum
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Fisik dan Prasarana
 - Bagian Ketertiban dan Keindahan

4.4 Perkembangan Variabel Penelitian

4.4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Makassar Periode 2009-2013

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar merupakan bagian penting dalam menjalankan alokasi belanja suatu daerah serta PAD sebagai alat ukur seberapa besar kemandirian fiskal suatu daerah sehingga semakin besar PAD suatu daerah, maka semakin berkurang ketergantungan alokasi belanjanya

dengan menggunakan dana transfer dari pusat, yang berarti semakin besar pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut.

Makassar sebagai kota besar di Indonesia, dengan pembangunan yang besar serta kondisi makro perekonomian yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga tercapai karena besarnya realisasi PAD tiap tahunnya sebagai stimulus belanja pemerintah yang juga akan meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD daerahnya masing-masing. Baik dari perbaikan pendataan dan administrasi serta menggalakkan program pajak dan retribusi, juga dari pengenaan pajak dan retribusi itu sendiri.

Tabel 4.5
Perkembangan Realisasi PAD Kota Makassar Tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi (Rp.)
2009	170.698.725.814
2010	210.136.331.088
2011	351.692.552.588
2012	484.972.799.508
2013	621.044.899.301

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD) (diolah)

Dari Tabel 4.5 diatas, terlihat bahwa PAD kota Makassar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini merupakan indikasi bahwa pemerintah daerah semakin melakukan perbaikan tiap tahunnya, baik dari segi administrasi maupun dari segi pemungutan pajak dan retribusi sebagai sumber utama PAD kota Makassar.

Dengan demikian, akan diteliti lebih jauh sumber-sumber PAD kota Makassar serta kontribusi masing-masing sumber tersebut. Sebagai langkah awal untuk meningkatkan PAD lebih tinggi lagi. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 77% dari tahun sebelumnya.

4.4.2 Perkembangan Realisasi Retribusi Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar Periode 2009-2013

Pendapatan pemerintah Kota Makassar yang tercermin dalam realisasi pendapatan asli daerah (PAD) memiliki fungsi sebagai pembiayaan atau pemakaian belanja daerah. Sedangkan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berfungsi untuk pembiayaan atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung kepada objek retribusi.

Tabel 4.6
Perkembangan Realisasi Retribusi Pedagang Kaki Lima Tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi (Rp.)
2009	2.173.420.494
2010	2.720.249.668
2011	2.481.980.370
2012	2.761.371.850
2013	4.573.168.804

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD) (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.6 Realisasi retribusi pedagang kaki lima diatas terlihat bahwa realisasi retribusi setiap tahunnya berfluktuatif. Dari tahun 2009 ke 2010 terlihat meningkat, namun pada tahun berikutnya yaitu 2011 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2012 dan 2013 walaupun perubahan fluktuatif yang terjadi tidak terlalu besar. Dengan range terendah Rp.2.173.420.494 dan range tertinggi sebesar Rp. 4.573.168.804. padahal diharapkan jumlah retribusi pedagang kaki lima ini akan selalu meningkat. Namun, retribusi pedagang kaki lima ini berbeda dengan retribusi daerah lain karena dengan semakin tingginya jumlah retribusi, maka di proyeksikan berarti jumlah pedagang kaki lima yang semakin banyak. Hal ini menjadi berlawanan dengan upaya pemerintah Kota Makassar untuk mengatur perencanaan kota dengan pedagang kaki lima sebagai salah satu sektor informal yang harus ditertibkan dan dikurangi.

Perubahan jumlah retribusi ini akan mempengaruhi total retribusi daerah kota Makassar serta akan mempengaruhi total PAD kota Makassar. Pengaruh besar nominal dari kedua variabel inilah yang akan diteliti lebih lanjut sejauh apa kontribusinya terhadap PAD kota Makassar.

4.4.3 Perkembangan Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar dan Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar di Kota Makassar Tahun 2009-2013

Pedagang kaki lima seringkali dijumpai pada pasar tradisional dan trotoar atau badan jalan di Kota Makassar. Berikut perkembangan pedagang kaki lima di Kota Makassar periode 2009-2013 berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh PD Pasar Makassar Raya.

4.4.3.1. Perkembangan Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar

Tabel 4.7
Data Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar Tahun 2009-2013

No	Tahun	Jumlah Pedagang Kaki Lima
1	2009	3.405
2	2010	3.590
3	2011	3.501
4	2012	3.752
5	2013	3.951

Sumber : PD. Pasar Makassar Raya, Kota Makassar tahun 2009-2013 (diolah)

Berdasarkan data jumlah pedagang kaki lima pada Tabel 4.7 dapat terlihat bahwa pedagang kaki lima di Kota Makassar mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan persentase rata-rata 5,01% dari tahun 2009-2013. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor ekonomi dan kualitas sumber daya manusia yang tidak memungkinkan terserap pada sektor formal.

Penyebab lainnya bisa dikarenakan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan di sektor formal. Sehingga para pencari kerja memilih untuk bekerja di salah satu sektor informal yaitu menjadi pedagang kaki lima.

4.4.3.2 Perkembangan Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar di Kota Makassar Tahun 2009-2013

Perkembangan jumlah pedagang kaki lima di Kota Makassar dikategorikan berdasarkan unit pasar di Kota Makassar. Dengan demikian akan terlihat pasar mana yang memiliki pedagang kaki lima terbanyak maupun

sebaliknya, serta melihat pergeseran pedagang kaki lima dari satu pasar ke pasar lain maupun berkurang atau meningkatnya jumlah pedagang kaki lima tersebut. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal, misalnya dikarenakan pedagang kaki lima tersebut bukan pindah unit pasar, namun karena pedagang kaki lima *free entry* dan *free exit* pada setiap unit pasar sehingga bisa leluasa untuk memilih berhenti berdagang di unit pasar tersebut atau sebaliknya justru ada yang memilih untuk masuk kedalam unit pasar sebagai pedagang kaki lima. Hal ini terlihat dari data jumlah pedagang kaki lima yang fluktuatif setiap tahunnya dan pada setiap unit pasar yang ada di Kota Makassar.

Tabel 4.8
Data Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar di Kota Makassar
Tahun 2009-2013

No	Unit Pasar	2009	2010	2011	2012	2013
1	MAKASSAR MALL	726	689	606	348	481
2	TERONG	560	576	625	688	700
3	KAMPUNG BARU	15	18	20	22	17
4	PANNAMPU	220	211	234	258	325
5	KALIMBU	235	238	265	266	268
6	KERUNG-KERUNG	-	-	-	35	24
7	MARICAYA	37	34	26	30	20
8	SAMBUNG JAWA	94	102	185	179	270
9	CENDERAWASIH	-	-	-	30	20
10	PA'BAENG-BAENG	386	575	377	381	428
11	PA'BAENG-BAENG TIMUR	-	-	-		60
12	PARANG TAMBUNG	469	457	494	498	77
13	PANAKKUKANG	67	70	75	86	145
14	DAYA	271	258	237	259	330
15	MANDAI	41	47	51	60	157
16	DARURAT UTARA	284	315	306	312	295
17	DARURAT SELATAN	-	-	-	300	298
18	PK5 (Trotoar Jalan)	-	-	-		
Total		3405	3590	3501	3752	3915

Sumber : PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar tahun 2009-2014 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, terlihat bahwa jumlah pedagang kaki lima berdasarkan unit pasar di kota Makassar terus meningkat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2009, terlihat bahwa jumlah pedagang kaki lima dengan persentase terbesar berada pada Makassar Mall, Terong, dan Parang Tambung yaitu masing-masing sebesar 726, 560, dan 469 atau 21,32%, 16,44%, dan 13,77% dari total jumlah pedagang kaki lima berdasarkan unit pasar di Kota Makassar. Sedangkan persentase terkecil berada pada Kampung Baru,

Maricaya, dan Mandai yaitu masing-masing sebesar 15, 37% dan 41 unit atau 0,44%, 1,08%, dan 1,20% dari total jumlah pedagang kaki lima berdasarkan unit pasar di kota makassar. Pada tahun 2013, jumlah pedagang kaki lima dengan persentase terbesar berada pada pasar Terong, Makassar Mall dan pedagang kaki lima yang menempati trotoar jalan yaitu masing-masing sebesar 717,705 dan 492 unit atau 16,14%, 15,87%, dan 11,07% dari total jumlah pedagang kaki lima berdasarkan unit pasar di kota makassar. Sedangkan persentase terkecil berada pada Kampung Baru, Kerung-kerung, dan Maricaya yaitu masing-masing sebesar 19, 24 dan 25 unit atau 0,43%, 0,54%, dan 0,56% dari total jumlah pedagang kaki lima berdasarkan unit pasar di kota makassar.

4.5 Analisis Data

4.5.1 Target dan Realisasi

4.5.1.1 Target dan Realisasi Retribusi Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar

Target retribusi pedagang kaki lima merupakan salah satu alat ukur dalam menilai aktifitas pengelola pedagang kaki lima dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Target retribusi pedagang kaki lima dibuat oleh pemerintah kota sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan dari masing-masing bagian yang ada dalam lingkup pemerintah kota untuk mengontrol pendapatan yang akan dicapai.

Dengan adanya target penerimaan retribusi pedagang kaki lima, maka sangat diharapkan adanya peningkatan penerimaan retribusi pedagang kaki lima dilakukan akan memberikan manfaat yakni peningkatan retribusi pedagang kaki lima. Oleh sebab itu dengan adanya terget penerimaan retribusi pedagang kaki lima, diharapkan mampu mencapai penerimaan retribusi pedagang kaki lima

yang maksimal. Berikut merupakan target, realisasi serta rasio penerimaan retribusi pedagang kaki lima yang dicapai selama 7 tahun terakhir.

Tabel 4.9
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima Kota Makassar Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2009	2.615.182.933	2.173.420.494	83,11
2010	2.592.010.750	2.720.249.668	104,95
2011	3.029.221.309	2.481.980.370	81,93
2012	2.848.725.180	2.761.371.850	96,93
2013	4.374.544.562	4.573.168.804	104,54

Sumber : PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar tahun 2009-2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, terlihat bahwa realisasi yang terjadi pada retribusi pedagang kaki lima mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 dari target Rp. 2.615.182.933 yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp. 2.173.420.494 atau sebesar 83,11% dari target anggaran retribusi pedagang kaki lima. Pada tahun 2010 persentase realisasi mengalami peningkatan pencapaian yaitu mencapai 104,95% dari target Rp. 2.592.010.750 yang ditargetkan pemerintah Kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp. 2.720.249.668. Pada tahun 2011 persentase realisasi mengalami penurunan pencapaian yang hanya mencapai 81,93% dari target Rp.3.029.221.309 yang ditargetkan pemerintah Kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp. 2.481.980.370, penurunan terjadi akibat adanya kebakaran pasar yang terjadi disalah satu pasar di Kota Makassar pada bulan Juni 2011. Pada tahun 2012 persentase realisasi mengalami peningkatan pencapaian yaitu mencapai 96,93% dari target Rp. 2.848.725.180 yang ditargetkan pemerintah

Kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp.2.761.371.850. Pada tahun 2013 persentase realisasi kembali mengalami peningkatan pencapaian yang mencapai 104,54% dari target Rp. 4.374.544.562 yang ditargetkan pemerintah Kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp.4.573.168.804.

Persentase tertinggi yang dicapai oleh realisasi penerimaan retribusi pedagang kaki lima terjadi pada tahun 2010 sebesar 104,95%. Sedangkan persentase terkecil terjadi pada tahun 2011 yang hanya mencapai 81,93%. Tidak tercapainya target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib retribusi yaitu pedagang kaki lima untuk membayar retribusi pedagang kaki lima dan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah cukup besar bagi pedagang kaki lima. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan staf bagian penagihan dan pedagang itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf bagian penagihan di PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar, menyatakan bahwa:

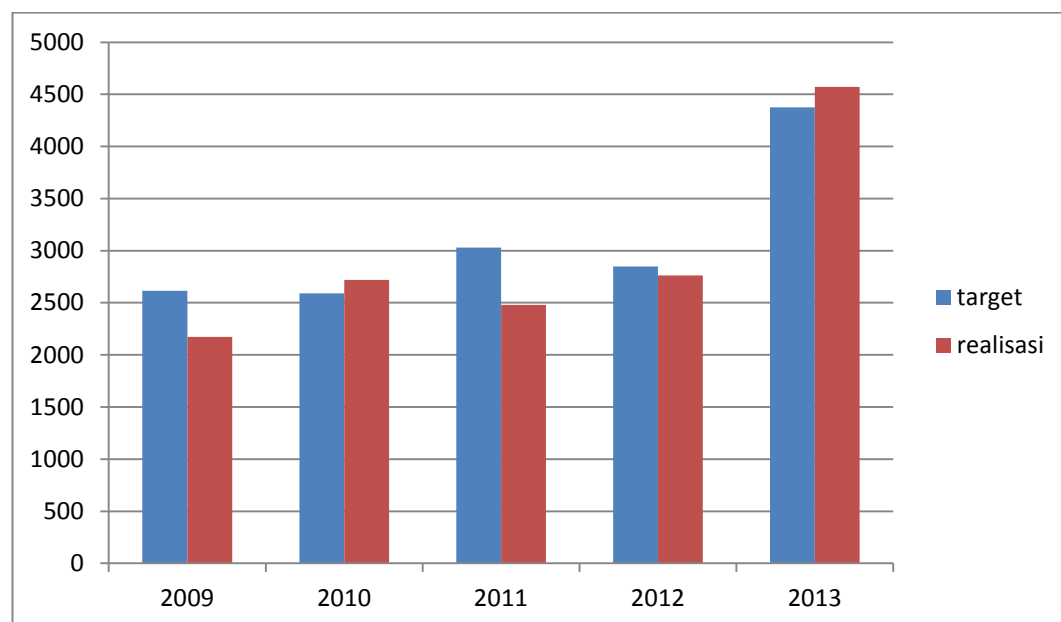
“Penerimaan retribusi tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah karena pedagang kaki lima banyak yang tidak mau membayar retribusi”. (wawancara, 18 februari 2015)

Hasil wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima yang berada disalah satu pasar di Kota Makassar, menyatakan bahwa:

“Banyak pedagang yang terlambat, bahkan tidak membayar retribusi karena unit usaha mereka berfluktuasi serta pendapatan yang tidak tetap, sehingga pedagang tersebut tidak memungkinkan untuk membayar retribusi yang dipungut setiap hari”.(wawancara, 24 februari 2015)

Berikut di tampilkan grafik yang menggambarkan perbedaan besaran target dan realisasi penerimaan retribusi pedagang kaki lima kota Makassar pada jangka waktu tahun penelitian untuk membandingkan besaran selisih antara target dan realisasi penerimaan retribusi pedagang kaki lima kota Makassar.

Gambar 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima Kota Makassar Tahun 2009-2013



Sumber : PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar tahun 2009-2013

Dari Gambar 4.1 di atas, terlihat bahwa persentase realisasi terhadap target retribusi paling rendah terjadi pada tahun 2011. Dengan kata lain, besaran selisih antara realisasi dan target yang paling besar terjadi pada tahun yang sama, yaitu sebesar Rp. 547.240.939.

Pada Gambar 4.1 di atas, terlihat pula bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2013 terjadi realisasi yang melampaui target yang akan dicapai. Besaran selisih dari kedua tahun tersebut masing-masing sebesar Rp. 128.238.918 dan Rp198.624.242. maka, persentase terbesar dari target dan realisasi retribusi

merupakan kondisi dimana realisasi melampaui target dengan selisih yang terbesar yaitu pada tahun 2013 sebesar 104,54%.

4.5.1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Makassar

Target retribusi pasar merupakan salah satu alat ukur dalam menilai aktifitas pengelola pasar dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya target penerimaan retribusi pasar, maka sangat diharapkan adanya peningkatan penerimaan retribusi pasar yang akan memberikan manfaat yakni peningkatan retribusi pasar. Oleh sebab itu dengan adanya target penerimaan retribusi pasar, diharapkan mampu mencapai penerimaan retribusi pasar yang maksimal.

Tabel 4.10
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Makassar Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi(Rp.)	Presentase (%)
2009	5.481.130.150	4.527.912.250	82,61
2010	5.477.348.850	5.334.671.990	97,40
2011	5.946.936.700	4.727.617.901	79,50
2012	5.988.750.000	5.826.927.200	97,30
2013	8.070.685.100	8.246.572.673	102,18

Sumber : PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar tahun 2009-2013)

Berdasarkan Tabel 4.10, menunjukkan realisasi penerimaan retribusi pasar yang dicapai oleh pemerintah Kota Makassar selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 dari target Rp. 5.481.130.150 yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp. 4.527.912.250 atau sebesar 82,61% dari target anggaran retribusi daerah. Pada

tahun 2010 persentase realisasi mengalami peningkatan pencapaian yang mencapai 97,40% dari target Rp. 5.477.348.850 yang ditargetkan pemerintah Kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp. 5.334.671.990. Pada tahun 2011 persentase realisasi mengalami penurunan pencapaian yang mencapai 79,50% dari target Rp 5.946.936.700 yang ditargetkan pemerintah Kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp. 4.727.617.901. Pada tahun 2012 pemerintah menaikkan target retribusi daerah dan persentase realisasi mengalami peningkatan pencapaian yang mencapai 97,30% dari target Rp. 5.988.750.000 yang ditargetkan pemerintah Kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp. 5.826.927.200. Pada tahun 2013 persentase realisasi mengalami peningkatan pencapaian yang mencapai 102,18% dari target Rp. 8.070.685.100 yang ditargetkan pemerintah Kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp.8.246.572.673. Sama halnya dengan realisasi retribusi pedagang kaki lima, realisasi retribusi pasar tidak mencapai target karena kurangnya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi pasar tersebut.

Berikut di tampilkan grafik yang menggambarkan perbedaan besaran target dan realisasi penerimaan retribusi pasar kota Makassar pada jangka waktu tahun penelitian untuk membandingkan besaran selisih antara target dan realisasi penerimaan retribusi pasar kota Makassar.

Gambar 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Makassar Tahun 2009-2013



Sumber : PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar tahun 2009-2013

Dari Gambar 4.2 di atas, terlihat bahwa persentase realisasi terhadap target retribusi paling rendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 79,50%. Dengan kata lain, besaran selisih antara realisasi dan target yang paling besar terjadi pada tahun yang sama, yaitu sebesar Rp. 1.219.318.799. Sedangkan persentase realisasi terhadap target retribusi terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 102,18%. Dengan kata lain, pada tahun yang sama besaran selisih antara realisasi dan target berada pada titik terendahnya yaitu sebesar minus (Rp.175.887.573). selisih yang negatif ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut realisasi melebihi target sebesar Rp.175.887.573 sehingga pada tahun tersebut realisasi retribusi paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun penelitian yang lain.

4.5.1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar

Dengan adanya target dan realisasi penerimaan retribusi daerah yang dibuat oleh pemerintah Kota Makassar, maka sangat diharapkan pemerintah Kota Makassar mampu mencapai penerimaan retribusi daerah yang maksimal. Agar pemerintah Kota Makassar dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan kegiatan operasional, maka pemerintah Kota Makassar harus mampu mencapai target penerimaan retribusi daerah yang telah dibuat atau bahkan melebihi target penerimaan retribusi daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 4.11
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi(Rp.)	Presentase (%)
2009	44.281.324.000	39.980.839.820	90,29
2010	62.971.506.000	59.729.103.725	94,85
2011	66.549.806.000	62.043.147.863	93,23
2012	84.141.194.850	69.257.410.559	82,31
2013	86.772.319.000	79.634.809.626	91,77

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD)

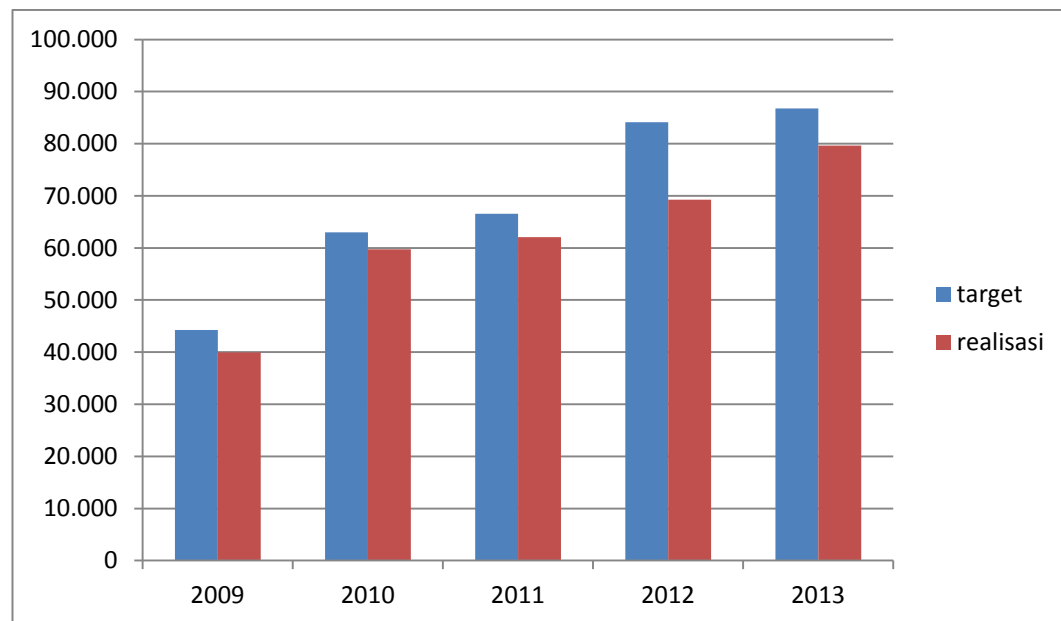
Berdasarkan Tabel 4.11, menunjukkan realisasi penerimaan retribusi daerah yang dicapai oleh pemerintah Kota Makassar selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 dari target Rp. 44.281.324.000 yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp.39.980.839.820 atau sebesar 90,29% dari target anggaran retribusi daerah. Pada tahun 2010 persentase realisasi mengalami peningkatan pencapaian yang mencapai 94,85% dari target Rp. 62.971.506.000 yang ditargetkan pemerintah

Kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp. 59.729.103.725. Pada tahun 2011 persentase realisasi mengalami penurunan pencapaian yang mencapai 93,23% dari target Rp 66.549.806.000 yang ditargetkan pemerintah Kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp. 62.043.147.863. Pada tahun 2012 pemerintah menaikkan target retribusi daerah dan persentase realisasi kembali mengalami penurunan pencapaian yang mencapai 82,31% dari target Rp. 84.141.194.850 yang ditargetkan pemerintah Kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp.69.257.410.559. Pada tahun 2013 persentase realisasi mengalami peningkatan pencapaian yang mencapai 91,77% dari target Rp.86.772.319.000 yang ditargetkan pemerintah Kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp.79.634.809.626.

Berdasarkan Tabel 4.11, persentase tertinggi yang dicapai oleh realisasi penerimaan retribusi daerah terjadi pada tahun 2010 sebesar 94,85%. Sedangkan persentase terkecil terjadi pada tahun 2012 yang hanya mencapai 82,31%.

Berikut di tampilkan grafik yang menggambarkan perbedaan besaran target dan realisasi penerimaan retribusi daerah kota Makassar pada jangka waktu tahun penelitian untuk membandingkan besaran selisih antara target dan realisasi penerimaan retribusi daerah kota Makassar.

Gambar 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar Tahun 2009-2013



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD)

Dari Gambar 4.3 di atas, terlihat bahwa persentase realisasi terhadap target retribusi paling rendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 82,31%. Dengan kata lain, besaran selisih antara realisasi dan target yang paling besar terjadi pada tahun yang sama, yaitu sebesar Rp. 14.883.784.291. Sedangkan persentase realisasi terhadap target retribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 94,85%. Dengan kata lain, pada tahun yang sama besaran selisih antara realisasi dan target berada pada titik terendah yaitu sebesar Rp.3.242.402.275 sehingga pada tahun tersebut realisasi retribusi paling mendekati target retribusi yang ditetapkan dibandingkan dengan tahun-tahun penelitian yang lain.

4.5.1.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pedapatan Asli Daerah Kota Makassar

Dengan adanya target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang dibuat oleh pemerintah Kota Makassar, maka sangat diharapkan pemerintah Kota Makassar mampu mencapai penerimaan pendapatan asli daerah yang maksimal. Agar pemerintah Kota Makassar dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan kegiatan operasional, maka pemerintah Kota Makassar harus mampu mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah yang telah dibuat atau bahkan melebihi target penerimaan pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 4.12
Target dan Realisasi Penerimaan Pedapatan Asli Daerah Kota Makassar
Tahun 2009-2013

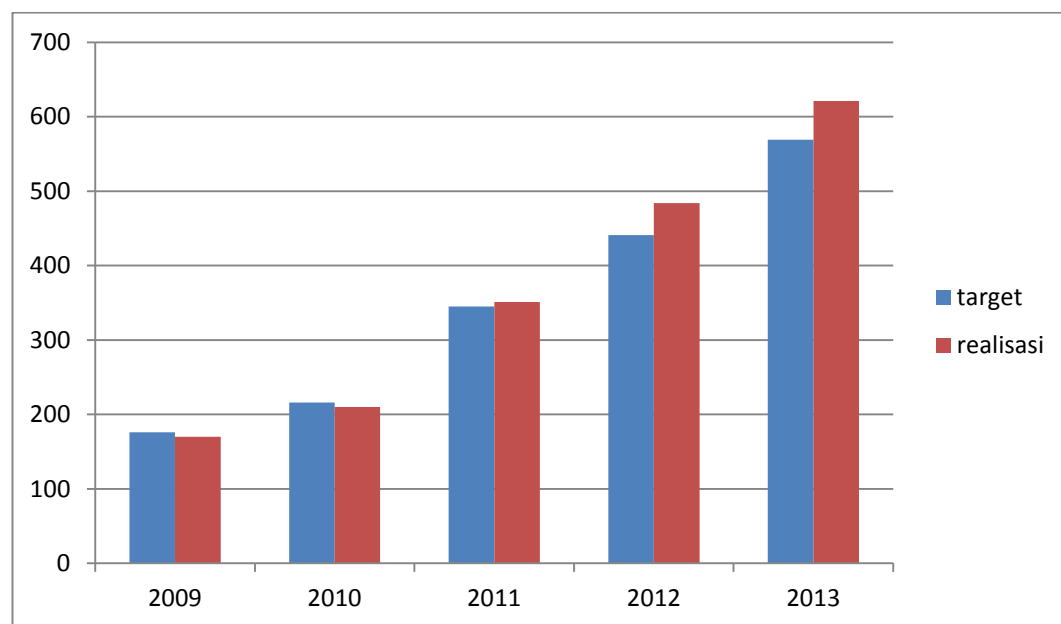
Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2009	176.628.387.000	170.698.725.814	96,64
2010	216.928.890.000	210.136.331.088	96,87
2011	345.335.311.000	351.692.552.588	101,84
2012	441.234.952.000	484.972.799.508	109,91
2013	569.727.462.000	621.044.899.301	109,01

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD)

Berdasarkan Tabel 4.12, menunjukkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang dicapai oleh pemerintah Kota Makassar selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pencapaian persentase tertinggi terjadi pada 2012 sebesar 109,91%, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 96,64%.

Berikut di tampilkan grafik yang menggambarkan perbedaan besaran target dan realisasi penerimaan asli daerah (PAD) kota Makassar pada jangka waktu tahun penelitian untuk membandingkan besaran selisih antara target dan realisasi penerimaan asli daerah (PAD) kota Makassar.

Gambar 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pedapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2009-2013



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD)

Dari Gambar 4.4 di atas, terlihat bahwa baik dari target maupun realisasi PAD kota Makassar memiliki kecenderungan meningkat setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Peningkatan tajam terjadi pada 3 tahun terakhir serta dengan kondisi total realisasi PAD yang lebih besar daripada target PAD kota Makassar yang sudah ditetapkan.

Terlihat pula bahwa persentase realisasi terhadap target retribusi paling rendah terjadi pada tahun 2009. Dengan kata lain, besaran selisih antara

realisasi dan target yang paling besar terjadi pada tahun tersebut, yaitu sebesar Rp. 176.457.688.275.

Pada Gambar 4.4, terlihat pula bahwa pada tiga tahun terakhir pengamatan yaitu tahun 2010, 2011 dan tahun 2013 terjadi realisasi yang melampaui target yang akan dicapai. Besaran selisih dari ketiga tahun tersebut adalah sebesar Rp. 6.357.241.558 untuk tahun 2011, sedangkan untuk tahun 2012 sebesar Rp 43.737.847.508 dan terakhir untuk tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 51.317.437.301.

4.5.2 Tingkat Efektifitas Retribusi Pedagang Kaki Lima

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dari retribusi pedagang kaki lima dapat dipergunakan rumus:

$$CPI = \frac{Rm}{Tm} \cdot 100\%, \quad (\text{Mangkusoebroto, 1993}), \text{ dimana:}$$

CPI = Change Performance Index/tingkat efektifitas retribusi pedagang kaki lima (%)

Rm = Realitation of Market Retribution/realisasi retribusi pedagang kaki lima (Rp.)

Tm = Target of Market Retribution/ target retribusi pedagang kaki lima (Rp.)

$$\text{Tahun 2009: } CPI = \frac{2.173.420.494}{2.615.182.933} \cdot 100\% = 83,11\%$$

$$\text{Tahun 2010: } CPI = \frac{2.720.249.668}{2.592.010.750} \cdot 100\% = 104,95\%$$

$$\text{Tahun 2011: } CPI = \frac{2.481.980.370}{3.029.221.309} \cdot 100\% = 81,93\%$$

$$\text{Tahun 2012: } CPI = \frac{2.761.371.850}{2.848.725.180} \cdot 100\% = 96,93\%$$

$$\text{Tahun 2013: } CPI = \frac{4.573.168.804}{4.374.544.562} \cdot 100\% = 104,54\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dengan ranking efektifitas:

81% - 100% = dikategorikan *sangat efektif*

61% - 80% = dikategorikan *efektif*

41% - 60% = dikategorikan *cukup efektif*

21% - 40% = dikategorikan *kurang efektif*

0% - 20% = dikategorikan *sangat kurang efektif*

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, pada periode 2009-2013 retribusi pedagang kaki lima dikatakan sangat efektif dengan pesentase masing-masing sebesar 83,11%, 104,95%, 81,93%, 96,93%, dan 104,54%. Berdasarkan hasil dari tahun 2009-2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan retribusi pedagang kaki lima yang terdapat di Kota Makassar dapat dikatakan sangat efektif.

Dengan hasil perhitungan efektifitas pemungutan retribusi pedagang kaki lima, ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kota Makassar telah menjalankan fungsi dan kegiatan operasionalnya dalam menghimpun dana retribusi pedagang kaki lima dengan nilai realisasi yang hampir mendekati target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Temuan ini berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2011) yang menemukan bahwa realisasi anggaran terhadap target anggaran hanya sebesar 21,3%. Namun, yang menjadikan perbedaan dalam temuan ini

adalah penelitian yang dilakukan Astuti dilakukan di pasar Regional Daya pada tahun 2005. Sehingga berbeda dengan hasil temuan dari penelitian ini.

4.5.3 Kontribusi

4.5.3.1 Kontribusi Realisasi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Retribusi Pasar

Retribusi pedagang kaki lima merupakan salah satu komponen dari retribusi pasar. Retribusi pedagang kaki lima merupakan komponen yang cukup besar kontribusinya terhadap retribusi pasar di Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Retribusi Pasar Tahun 2009-2013

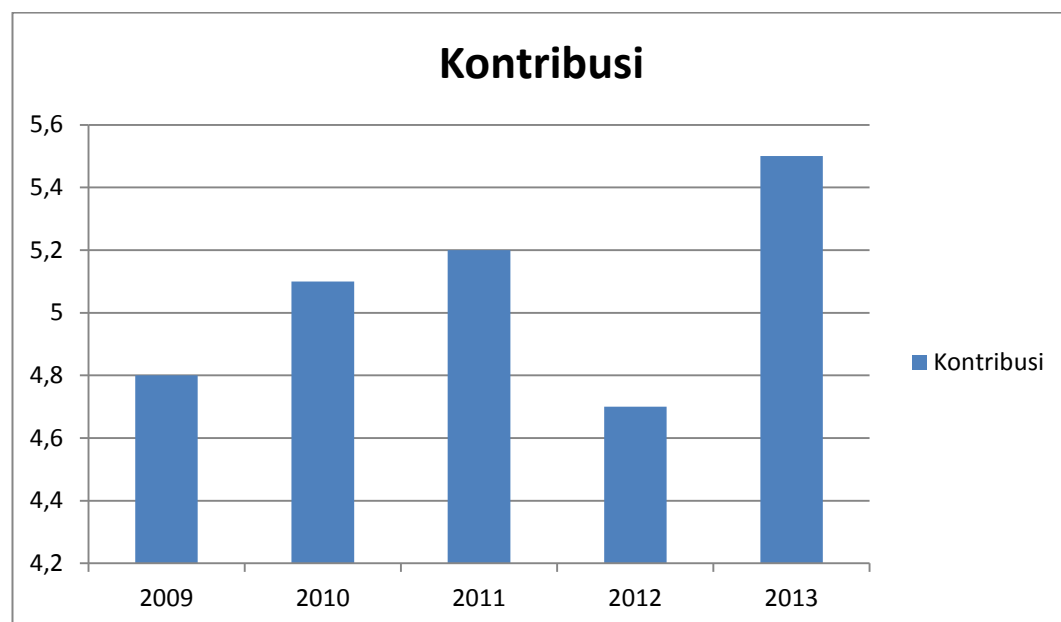
Tahun	Retribusi Pedagang Kaki Lima (Rp.)	Retribusi Pasar (Rp.)	Persentase (%)
2009	2.173.420.494	4.527.912.250	48,00
2010	2.720.249.668	5.334.671.990	50,99
2011	2.481.980.370	4.727.617.901	52,49
2012	2.761.371.850	5.826.927.200	47,38
2013	4.573.168.804	8.246.572.673	55,45

Sumber: PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar tahun 2009-2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.13, pada tahun 2009 retribusi pedagang kaki lima memberikan kontribusi sebesar 48,00% atau Rp. 2.173.420.494 dari total retribusi pasar Rp. 4.527.912.250. Pada tahun 2010-2011 terjadi peningkatan persentase masing-masing menjadi 50,99% dan 52,49%. Pada tahun 2012 terjadi penurunan pencapaian menjadi 47,38% atau Rp. 2.761.371.850 dari total

retribusi pasar Rp. 5.826.927.200. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan persentase menjadi 55,45% atau Rp. 4.573.168.804 dari total retribusi daerah Rp. 8.246.572.673. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi retribusi pedagang kaki lima terhadap retribusi pasar cukup besar.

Gambar 4.5 Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Retribusi Pasar Tahun 2009-2013



Sumber: PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar tahun 2009-2013

Dari Gambar 4.6 di atas, terlihat bahwa kontribusi retribusi pedagang kaki lima terhadap retribusi pasar mengalami kecenderungan untuk meningkat tiap tahun, namun menurun pada tahun 2012 yang turun sebesar 5,11% dari tahun sebelumnya bahkan menjadi tahun dengan kontribusi terendah selama periode pengamatan. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2012 ke 2013 yaitu dari 47,38% menjadi 55,45% dengan kata lain mengalami peningkatan sebesar 0,87%.

Kenaikan terbesar yang terjadi pada tahun 2013 disebabkan oleh meningkatnya retribusi pedagang kaki lima dari Rp. 2.761.371.850 naik menjadi

Rp. 4.573.168.804 dengan besar kenaikan Rp.1.811.796.954. walaupun diiringi pula dengan peningkatan retribusi pasar, namun kenaikan retribusi pasar tidak sebesar kenaikan retribusi pedagang kaki lima pada tahun tersebut. Sehingga kenaikan kontribusi pedagang kaki lima terhadap retribusi pasar bisa disebabkan oleh meningkatnya retribusi pedagang kaki lima atau disebabkan oleh penurunan retribusi pasar. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2013 ini lebih diakibatkan karena kenaikan retribusi pedagang kaki lima sebesar 65%.

4.5.3.2 Kontribusi Realisasi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Retribusi Daerah

Retribusi pedagang kaki lima merupakan bagian penting dari retribusi daerah dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Untuk melihat berapa besar kontribusi yang diberikan retribusi pedagang kaki lima dapat dipergunakan rumus:

$$K = \frac{Y_i}{R} \times 100\% , \text{ dimana:}$$

K = Besarnya kontribusi retribusi pedagang kaki lima terhadap retribusi daerah

Y_i = Retribusi pedagang kaki lima (Rp.)

R = Retribusi daerah (Rp.)

Dengan menggunakan rumus tersebut diatas, maka diperoleh hasil:

$$K = \frac{Y_i}{R} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2009: } K = \frac{2.173.420.494}{39.980.839.820} \times 100\%$$

$$K = 5,44\%$$

$$\text{Tahun 2010: } K = \frac{2.720.249.668}{59.729.103.725} \times 100\%$$

$$K = 4,55\%$$

Kontribusi yang dihasilkan oleh retribusi pedagang kaki lima terhadap retribusi daerah pada tahun 2009 sebesar 5,44% atau Rp. 2.173.420.494 dari total seluruh retribusi daerah sebesar Rp. 39.980.839.820. Pada tahun 2010 kontribusi yang dihasilkan sebesar 4,55% atau Rp. 2.720.249.668 dari total seluruh retribusi daerah sebesar Rp. 59.729.103.725. Dengan cara yang sama maka akan diperoleh hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2009-2013

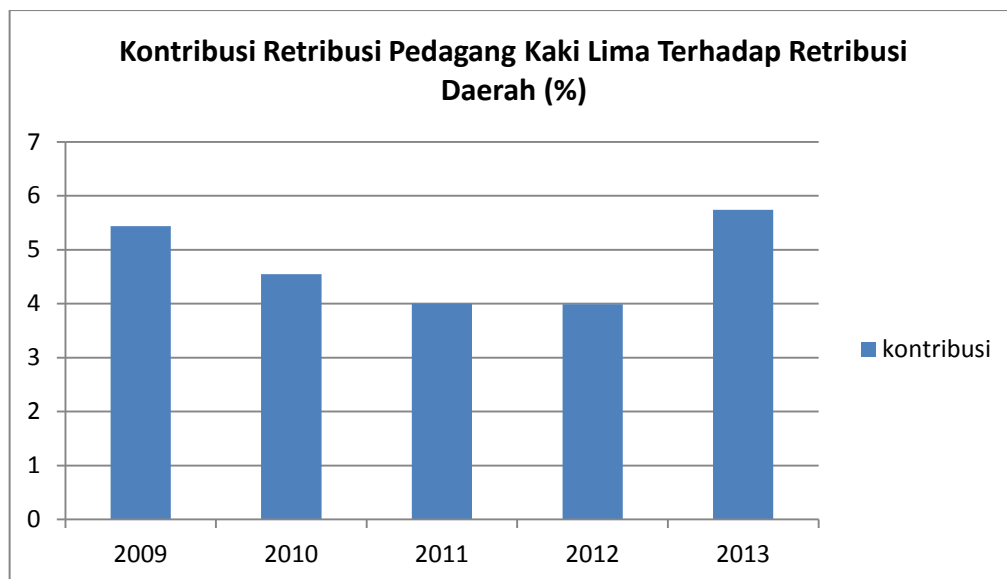
Tahun	Retribusi Pedagang Kaki Lima (Rp.)	Retribusi Daerah (Rp.)	Persentase (%)
2009	2.173.420.494	39.980.839.820	5,44
2010	2.720.249.668	59.729.103.725	4,55
2011	2.481.980.370	62.043.147.863	4,00
2012	2.761.371.850	69.257.410.559	3,99
2013	4.573.168.804	79.634.809.626	5,74

Sumber: PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar tahun 2009-2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.14, pada tahun 2009 retribusi pedagang kaki lima memberikan kontribusi sebesar 5,44% atau Rp. 2.173.420.494 dari total retribusi daerah Rp. 39.980.839.820. Pada tahun 2010 terjadi penurunan persentase menjadi 4,55% atau Rp. 2.720.249.668 dari total retribusi daerah Rp.59.729.103.725. Pada tahun 2011-2012 persentase retribusi pedagang kaki

lima terhadap retribusi daerah kembali mengalami penurunan sebesar 4,00% dan 3,99%. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan persentase menjadi 5,74% atau Rp. 4.573.168.804 dari total retribusi daerah Rp. 79.634.809.626.

Gambar 4.6 Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2009-2013



Sumber: PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar tahun 2009-2013

Dari Gambar 4.6 di atas, terlihat bahwa kontribusi retribusi pedagang kaki lima mengalami kecenderungan untuk menurun tiap tahun, namun meningkat pada tahun terakhir pengamatan yaitu pada tahun 2013 yang naik bahkan menjadi tahun dengan kontribusi terbesar selama periode pengamatan. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2009 ke 2010 yaitu dari 5,44% menjadi 4,55% dengan kata lain mengalami penurunan sebesar 0,89%.

Sedangkan kenaikan kontribusi retribusi pedagang kaki lima terhadap retribusi daerah yang terbesar terjadi pada tahun terakhir pengamatan yaitu pada tahun 2013 yang meningkat dari 3,99% dari tahun 2012 menjadi 5,74% pada tahun 2013. Hal ini terjadi bisa diakibatkan karena perubahan retribusi pedagang

kaki lima pada tahun tersebut yang meningkat tajam, atau yang terjadi adalah retribusi daerah kota Makassar yang besaran selisihnya dengan tahun sebelumnya lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, dari yang terlihat selisih besaran retribusi daerah kota makassar dari tahun 2012 ke 2013 tersebut sebesar Rp. 10.377399.067 atau tumbuh sebesar 14%. Sedangkan untuk retribusi pedagang kaki lima pada tahun 2013 selisihnya dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp.1.811.796.954 atau tumbuh sebesar 65%. Sehingga dengan membandingkan pertumbuhan pada tahun 2013 dari retribusi pedagang kaki lima dan retribusi daerah kota Makassar, maka dapat disimpulkan melonjaknya kontribusi retribusi pedagang kaki lima dikarenakan besarnya pertumbuhan retribusi pedagang kaki lima kota Makassar yang mencapai 65%.

4.5.3.3 Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$K = \frac{Y_i}{Y} \times 100\% \quad (\text{Nurdjaman A. : 1992 : 62}), \text{ dimana:}$$

K = Besarnya kontribusi retribusi pedagang kaki lima terhadap pendapatan asli daerah (%)

Y_i = Retribusi pedagang kaki lima (Rp.)

Y = Pendapatan Asli Daerah (Rp.)

$$K = \frac{2.173.420.494}{170.698.725.814} \times 100\%$$

$$K = 1,27\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan mempergunakan formulasi diatas, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:

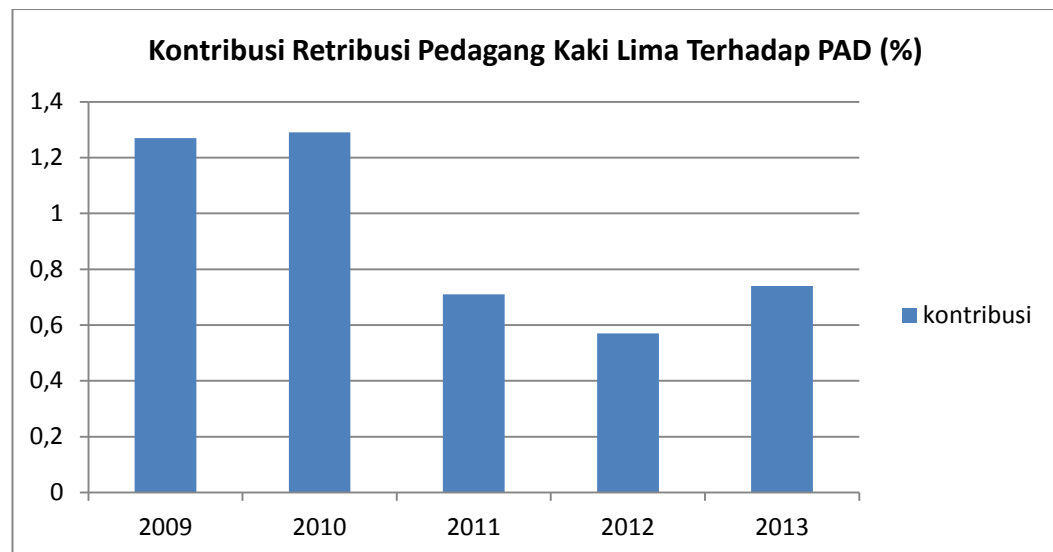
Tabel 4.15
Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap PAD Tahun 2009-2013

Tahun	Retribusi Pedagang Kaki Lima (Rp.)	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Persentase (%)
2009	2.173.420.494	170.698.725.814	1,27
2010	2.720.249.668	210.136.331.088	1,29
2011	2.481.980.370	351.692.552.588	0,71
2012	2.761.371.850	484.972.799.508	0,57
2013	4.573.168.804	621.044.899.301	0,74

Sumber: PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar tahun 2009-2013 (diolah)

Dari hasil perhitungan kontribusi retribusi pedagang kaki lima terhadap PAD kota Makassar memiliki persentase yang rendah. Yaitu hanya berkisar antara 0,57% sampai 1,29% terhadap total PAD kota Makassar. Hal ini terjadi karena total realisasi retribusi pedagang kaki lima rendah, walaupun jumlah pedagang kaki lima meningkat setiap tahunnya.

Gambar 4.7 Kontribusi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap PAD Tahun 2009-2013



Sumber: PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar tahun 2009-2013

Dari Gambar 4.7, terlihat bahwa kontribusi retribusi pedagang kaki lima terhadap PAD kota Makassar mengalami trend yang menurun, kecuali pada tahun 2013 yang kembali meningkat. Walaupun nilai nominal dari kedua variable yaitu retribusi pedagang kaki lima dan PAD kota Makassar yang berfluktuatif, namun tidak memberikan perubahan pada kecenderungan persentase kontribusi yang semakin menurun tiap tahun kecuali tahun 2010 dan 2013. Keduatahun tersebut meningkat dari tahun 2009 ke 2010 dengan besaran persentase dari 1,27% pada tahun 2009 menjadi 1,29% pada tahun 2010. Hal yang sama terjadi pada tahun 2012 yang meningkat ke tahun 2013 sebesar 0,57% pada tahun 2012 menjadi 0,74% pada tahun 2013.

Kenaikan kontribusi retribusi pedagang kaki lima pada tahun 2013 ini sama dengan kenaikan kontribusi retribusi pedagang kaki lima terhadap retribusi daerah kota Makassar. Penyebabnyapun masih sama, yaitu besarnya retribusi pedagang kaki lima pada tahun tersebut yang menyebabkan besarnya kontribusi

retribusi pedagang kaki lima baik jika dihitung terhadap retribusi daerah kota Makassar, maupun dihitung terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar.

Hal ini berbeda dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh tarigan (2012) di deli serdang yang menghasilkan kesimpulan bahwa pedagang kaki lima di Kota Deli serdang memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD kota Deli serdang. Hal ini bisa dikarenakan perbedaan dalam pengenaan tarif retribusi pedagang kaki lima atau perbedaan dari jumlah pedagang kaki lima di Kota Deli serdang yang besar serta bisa dari besaran jumlah total PAD kota Deli serdang yang kecil, sehingga kontribusi dari retribusi daerah menjadi besar.

4.5.3.4 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Makassar

Retribusi daerah adalah salah satu komponen sumber pendapatan daerah selain pajak daerah, perusahaan dan pendapatan-pendapatan lainnya. Retribusi daerah merupakan komponen yang cukup besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah setelah penerimaan lain-lain. Perhatikan Tabel 4.16:

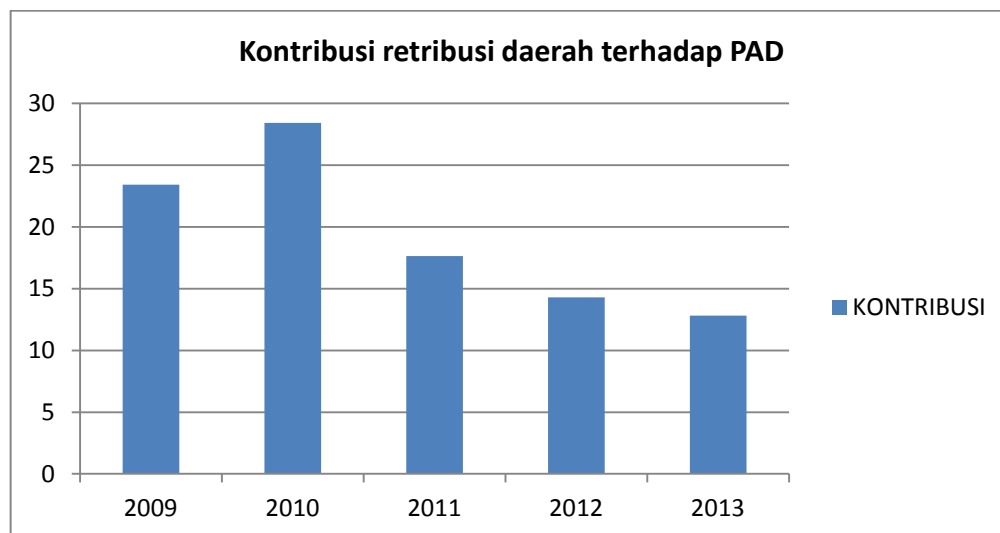
Tabel 4.16
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Tahun 2009-2013

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Retribusi Daerah (Rp.)	Persentase (%)
2009	170.698.725.814	39.980.839.820	23,42
2010	210.136.331.088	59.729.103.725	28,42
2011	351.692.552.588	62.043.147.863	17,64
2012	484.972.799.508	69.257.410.559	14,28
2013	621.044.899.301	79.634.809.626	12,82

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD)

Berdasarkan tabel 4.16, secara nominal retribusi daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah cenderung berfluktuatif, yaitu mengalami peningkatan ditahun 2010 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011-2013.

Gambar 4.8 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2009-2013



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD)

Dari Gambar 4.8, terlihat bahwa kontribusi retribusi daerah kota Makassar terhadap PAD kota Makassar mengalami kecenderungan menurun, kecuali pada tahun 2010 justru terjadi peningkatan yang cukup tajam yaitu dari tahun 2009 sebesar 23,42% menjadi 28,42% pada tahun 2010 kemudian terus mengalami penurunan besaran kontribusi retribusi daerah terhadap PAD kota Makassar ini sampai akhir tahun pengamatan.

Dengan kontribusi yang semakin kecil, maka peran retribusi daerah didalam pembentukan pendapatan asli daerah kota Makassar semakin rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh selisih antara PAD kota Makassar terhadap Retribusi daerah yang semakin besar. Peningkatan selisih tersebut bisa

disebabkan oleh PAD kota Makassar yang meningkat tajam, atau retribusi daerah yang peningkatannya rendah sehingga persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD kota Makassar semakin rendah tiap tahun.

4.5.4 Prediksi Potensi Retribusi Pedagang Kaki lima di Kota Makassar

Untuk mengestimasi potensi Retribusi Pedagang kaki lima di Kota Makassar dari tahun 2014-2017 digunakan data jumlah pedagang kaki lima dikali dengan tarif retribusi pedagang kaki lima dan waktu pemungutan retribusi pedagang kaki lima. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara realisasi dengan potensi. Pada tahun 2014 potensi penerimaan Retribusi pedagang kaki lima bernilai Rp. 8.108.475.000 atau naik sekitar 34,07 % dari target pada tahun 2014. Pada Tabel 4.17, akan ditampilkan estimasi jumlah pedagang kaki lima di kota makassar tahun 2015-2017, untuk hasil mengestimasi jumlah pedagang kaki lima di kota makassar dari tahun 2015-2017 digunakan rata-rata pertumbuhan jumlah pedagang kaki lima di kota makassar dari tahun 2009-2014, yakni sebesar 5,01 %.

Untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi pedagang kaki lima, maka secara sederhana dipergunakan rumus:

$$Pr = Jpkl \times Tr \times t$$

Ppkl : Potensi pedagang kaki lima (Rp)

Jpkl : Jumlah pedagang kaki lima

Tr : Tarif Retribusi pedagang kaki lima (Rp)

t : Waktu Pemungutan (Hari)

$$\text{Pr}_{2014} = \text{Jpkl}_{2014} \times \text{Tr} \times t$$

$$= 4.443 \times 5.000 \times 365$$

$$= 8.108.475.000$$

Data pada Tabel 4.17 dan Gambar 4.8 menunjukkan data jumlah pedagang kaki lima di kota makassar dari tahun 2009-2017, data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pedagang kaki lima dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebesar 46,45 % dari tahun 2009 sampai tahun 2017.

Tabel 4.17
Estimasi Jumlah pedagang kaki lima berdasarkan unit pasar di kota
makassar tahun 2009-2017

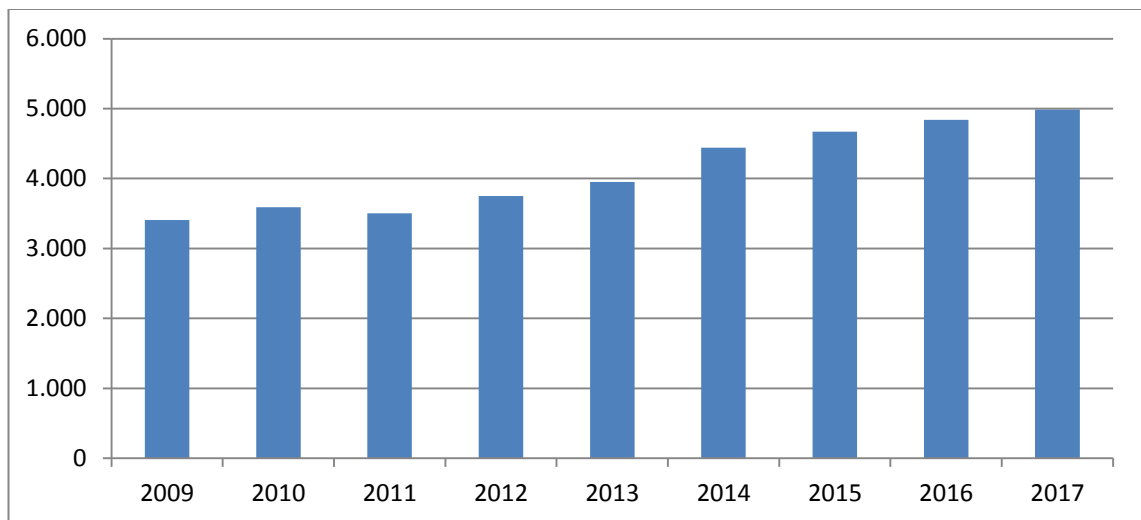
No	Unit Pasar	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*
1	MAKASSAR MALL	726	689	606	348	481	717	725	682	642
2	TERONG	560	576	625	688	700	705	733	763	793
3	KAMPUNG BARU	15	18	20	22	17	19	20	22	25
4	PANNAMPU	220	211	234	258	325	340	364	389	416
5	KALIMBU	235	238	265	266	268	274	281	288	295
6	KERUNG-KERUN	-	-	-	35	24	24	28	32	35
7	MARICAYA	37	34	26	30	20	25	31	36	41
8	SAMBUNG JAWA	94	102	185	179	270	275	290	305	316
9	CENDERAWASIH	-	-	-	30	20	38	45	52	56
10	PA'BAENG-BAENG	386	575	377	381	428	229	251	278	295
11	PA'BAENG-BAENG TIMUR	-	-	-	-	60	42	48	54	59
12	PARANG TAMBUNG	469	457	494	498	77	77	115	135	145
13	PANAKKUKANG	67	70	75	86	145	145	152	160	169
14	DAYA	271	258	237	259	330	330	339	348	357
15	MANDAI	41	47	51	60	157	119	134	151	161
16	DARURAT UTARA	284	315	306	312	295	295	297	302	307
17	DARURAT SELATAN	-	-	-	300	298	297	299	302	305
18	PK5 (Trotoar Jalan)	-	-	-	-	-	492	517	543	570
Total		3405	3590	3501	3752	3915	4443	4.669	4.842	4.987

Sumber: PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar 2009-2014, diolah (*Estimasi).

Peningkatan jumlah pedagang kaki lima pada tiap-tiap unit pasar mengalami perbedaan terlihat bahwa pedagang kaki lima di unit pasar Makassar mall mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini bisa disebabkan karena prospek kondisi di daerah Makassar mall bagi pedagang kaki lima akan di minimalisir. Hal ini juga implikasi dari fungsi PD. Pasar Makassar Raya bahwa dalam melakukan pemungutan retribusi, juga dilakukan pendataan sebagai bentuk *controlling* bagi para pedagang kaki lima. Begitupun pasar kerung-kerung

yang mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Namun, ditengah fluktuatifnya jumlah pedagang kaki lima, total jumlah pedagang kaki lima di kota Makassar tetap mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan nominal yang besar.

Gambar 4.9
Jumlah pedagang kaki lima di kota makassar tahun 2009-2017



Sumber: PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar (*estimasi)

Dengan pertumbuhan pedagang kaki lima sebesar 45,46% tersebut, maka akan memberikan kontribusi pada hasil perhitungan potensi retribusi pedagang kaki lima di Kota Makassar yang juga semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima tersebut maka pemerintah bisa meningkatkan target retribusinya disesuaikan dengan potensi dari jumlah pedagang kaki lima yang terus bertambah ini.

Dengan menggunakan data jumlah pedagang kaki lima dan estimasinya sampai pada tahun 2017 serta menggunakan rumus perhitungan potensi retribusi di pembahasan sebelumnya, maka akan didapatkan hasil estimasi

potensi retribusi pedagang kaki lima berdasarkan unit pasar dikota Makassar seperti pada table 4.18 berikut.

Tabel 4.18
Hasil Estimasi Potensi Retribusi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar di Kota Makassar Tahun 2014-2017

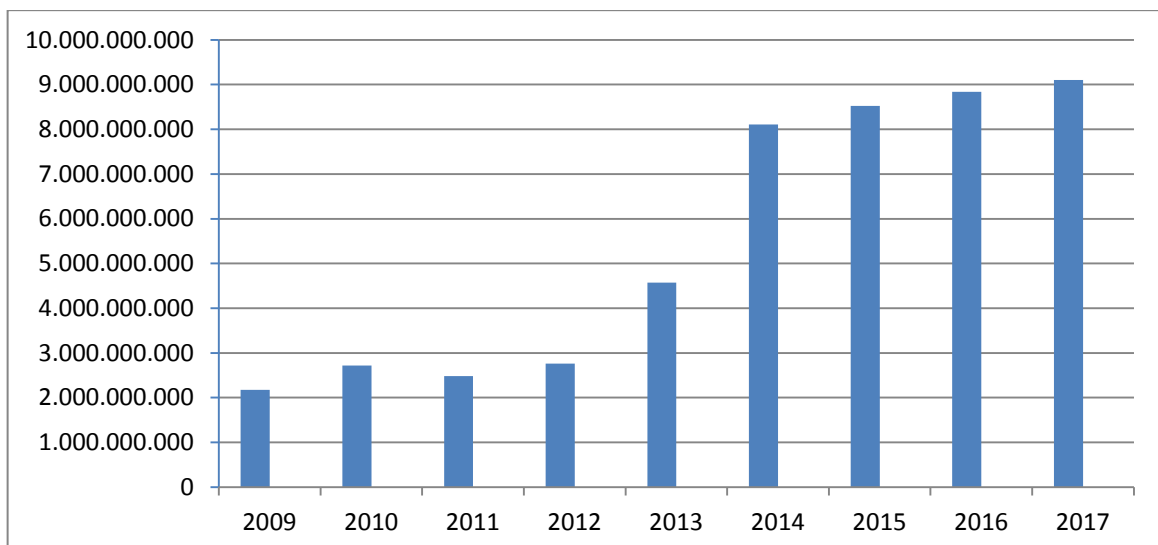
No	Unit Pasar	Realisasi Tahun 2014(Rp.)	Potensi			
			Estimasi 2014 (Rp.)	Estimasi 2015 (Rp.)	Estimasi 2016 (Rp.)	Estimasi 2017 (Rp.)
1	MAKASSAR MALL	796.858.092	1.308.525.000	1.323.125.000	1.244.650.000	1.171.650.000
2	TERONG	900.592.702	1.286.625.000	1.337.725.000	1.392.475.000	1.447.225.000
3	KAMPUNG BARU	30.957.953	34.675.000	36.500.000	40.150.000	45.625.000
4	PANNAMPU	466.369.206	620.500.000	664.300.000	709.925.000	759.200.000
5	KALIMBU	347.852.015	500.050.000	512.825.000	525.600.000	538.375.000
6	KERUNG2	24.906.154	43.800.000	51.100.000	58.400.000	63.875.000
7	MARICAYA	45.933.629	45.625.000	56.575.000	65.700.000	74.825.000
8	SAMBUNG JAWA	341.646.480	501.875.000	529.250.000	556.625.000	576.700.000
9	CENDERAWASIH	53.380.096	69.350.000	82.125.000	94.900.000	102.200.000
10	PA'BAENG-BAENG	363.978.387	417.925.000	458.075.000	507.350.000	538.375.000
11	PA'BAENG-BAENG TIMUR	75.751.760	76.650.000	87.600.000	98.550.000	107.675.000
12	PARANG TAMBUNG	129.764.932	140.525.000	209.875.000	246.375.000	264.625.000
13	PANAKKUKANG	219.869.037	264.625.000	277.400.000	292.000.000	308.425.000
14	DAYA	312.262.500	602.250.000	618.675.000	635.100.000	651.525.000
15	MANDAI	92.869.820	217.175.000	244.550.000	275.575.000	293.825.000
16	DARURAT UTARA	308.040.000	538.375.000	542.025.000	551.150.000	560.275.000
17	DARURAT SELATAN	322.680.000	542.025.000	545.675.000	551.150.000	556.625.000
18	PK5 (Trotoar Jalan)	512.520.000	897.900.000	943.525.000	990.975.000	1.040.250.000
Total		5.346.232.763	8.108.475.000	8.520.925.000	8.836.650.000	9.101.275.000

Sumber: PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar 2014, diolah (*Estimasi).

Dari Tabel 4.18, hasil estimasi perhitungan potensi pedagang kaki lima di atas terlihat bahwa secara total jumlah potensi retribusi pedagang kaki lima mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2009 sampai tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima memiliki prospek yang bagus

sebagai sumber pendanaan daerah yang akan meningkatkan PAD kota Makassar karena besarnya potensi yang dimiliki oleh pedagang kaki lima sebagai subjek dari retribusi pedagang kaki lima ini. Sedangkan penyebab dari tingginya total jumlah potensi retribusi pedagang kaki lima dikarenakan beberapa hal. Salah satunya merupakan hasil dari estimasi yang dilakukan pada jumlah total pedagang kaki lima yang terus meningkat setiap tahunnya. Baik dari data riil yang didapatkan di lapangan maupun data hasil *forecasting* sampai tahun 2017 yang menyebabkan perhitungan pada estimasi total potensi retribusi pedagang kaki lima juga akan meningkat seiring peningkatan jumlah pedagang kaki lima. Hal tersebut lebih terlihat pada Gambar 4.10 berikut.

Gambar 4. 10
Hasil Estimasi Retribusi Pedagang Kaki lima di Kota Makassar Tahun 2009-2017



Sumber: PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar (*estimasi)

Selain perubahan dari total potensi retribusi pedagang kaki lima, juga dapat dilihat perubahan sepanjang tahun yang terjadi pada tiap-tiap unit pasar yang ditentukan oleh jumlah pedagang kaki lima di unit pasar tersebut. Dinamika

perubahan yang terjadi pada jumlah pedagang kaki lima sama besarnya dengan perubahan yang terjadi pada potensi pedagang kaki lima tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah. Sehingga, perubahan estimasi potensi retribusi yang terjadi pada beberapa unit pasar yang juga mengalami perubahan fluktuatif seperti unit pasar makassar mall dan unit pasar kampung baru disebabkan oleh berubah secara fluktuatifnya jumlah pedagang kaki lima di unit pasar tersebut sedangkan unit pasar yang lainnya mengalami trend yang meningkat setiap tahunnya yang berarti juga bahwa pedagang kaki lima di unit pasar lainnya selain pasar makassar mall dan pasar kampung baru mengalami trend untuk meningkat.

Sebagai bahan perbandingan mengenai peran retribusi pedagang kaki lima dalam kontribusinya terhadap retribusi daerah kota Makassar yang merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah PAD kota Makassar, maka akan ditampilkan di Table 4.19, bahwa retribusi daerah memiliki kontribusi terbesar kedua setelah pajak.

Tabel 4.19
Kontribusi Realisasi Sumber-Sumber PAD Terhadap Total PAD Kota Makassar Tahun Anggaran 2013

Jenis Penerimaan	Realisasi (Rp.)	Kontribusi (%)
Pajak Daerah	518.703.083.895	83,52
Retribusi Daerah	79.634.809.626	12,82
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.355.687.310	1,02
Lain-lain PAD yang Sah	16.351.318.470	2,63
Total PAD	621.044.899.301	100

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKA)

Pada Tabel 4.19, dapat dilihat bagaimana tiap komponen penerimaan mempengaruhi pendapatan asli daerah dalam tahun 2013. Retribusi daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang memberi kontribusi sebesar 12,82%.

Sehingga, dengan hasil estimasi potensi retribusi pedagang kaki lima Kota Makassar yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka akan memperbesar retribusi daerah serta akan meningkatkan PAD Kota Makassar. Dengan potensi retribusi pedagang kaki lima yang terus bertambah sejalan dengan terus bertambahnya pedagang kaki lima, maka menjadikan pedagang kaki lima sebagai objek pengenaan retribusi harus menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah daerah Kota Makassar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa analisis menggunakan metode penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berupa:

1. Berdasarkan rasio target dan realisasi retribusi Pedagang Kaki Lima mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Fluktuatif ini terjadi karena nilai rasio tersebut di perngaruhi oleh target yang ditetapkan pemerintah yang juga meningkat sejalan dengan peningkatan realisasi retribusi pedagang kaki lima sehingga walaupun rasio tersebut bersifat fluktuatif namun nilai dari realisasi retribusi pedagang kaki lima mengalami trend yang meningkat. Jadi, fluktuatifnya rasio ini menggambarkan bahwa target yang ditetapkan pemerintah tidak terpenuhi dalam realisasinya.
2. Berdasarkan rasio target dan realisasi retribusi daerah kota Makassar mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sama halnya dengan rasio antara target dan realisasi pada retribusi pedagang kaki lima, target dan realisasi pada retribusi daerah yang fluktuatif juga dikarenakan pemerintah tidak tepat dalam menetapkan nilai target retribusi daerah dan tidak tercapainya realisasi retribusi daerah kota Makassar.
3. Berdasarkan rasio target dan realisasi PAD kota Makassar juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya. Walaupun mengalami fluktuasi tiap tahunnya, namun nilai besaran target maupun

realisasi kecenderungannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

4. Efektifitas retribusi pedagang kaki lima di Kota Makassar bersifat **sangat efektif**. Hal ini terlihat dari rasio antara target dan realisasi retribusi pedagang kaki lima sangat besar Sehingga pemerintah dikategorikan menjalankan penetapan target dan proses realisasi retribusi pedagang kaki lima berjalan dengan efektif.
5. Kontribusi retribusi pedagang kaki lima terhadap retribusi daerah di Kota Makassar termasuk dalam kategori rendah. Hal ini karena besaran retribusi yang ditetapkan pada pedagang kaki lima nilainya rendah, dikarenakan pedagang kaki lima mendapatkan pendapatan dalam jumlah yang kecil.
6. Kontribusi retribusi pedagang kaki lima terhadap PAD kota Makassar termasuk dalam kategori rendah. Hal ini karena total realisasi retribusi pedagang kaki lima rendah walaupun jumlah pedagang kaki lima meningkat serta PAD Kota Makassar mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya.
7. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Makassar termasuk dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan lebih besarnya persentase kontribusi yang diberikan oleh sumber-sumber PAD yang lain, terutama pajak.
8. Prediksi potensi retribusi pedagang kaki lima kota Makassar memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan estimasi dari data jumlah pedagang kaki lima yang meningkat setiap tahunnya di Kota Makassar.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil serta kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis memiliki saran-saran kepada para *stakeholder* yaitu sebagai berikut:

1. Dengan hasil kesimpulan bahwa potensi retribusi pedagang kaki lima mengalami kecenderungan yang meningkat dikarenakan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima setiap tahunnya, maka menjadi tugas dan bahan kajian bersama mengenai penyebab bertambahnya pedagang kaki lima di Kota Makassar. Kajian ini perlu dilakukan secara komprehensif, bukan hanya dari segi ekonomi namun juga dari segi sosial, budaya, hukum serta politik. Karena sektor informal berupa pedagang kaki lima ini merupakan cerminan dari masyarakat kota Makassar yang memilih memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang rendah.
2. Retribusi pedagang kaki lima dapat dijadikan alat bagi pemerintah untuk mengontrol keberadaan pedagang kaki lima yang cenderung bertambah setiap tahunnya, dengan selalu melakukan pendataan bagi para pedagang kaki lima. Sehingga saran lainnya adalah disediakannya data lain yang bisa dilakukan pada pedagang kaki lima bukan hanya jumlah pedagang kaki lima tetapi juga bisa mencakup sisi ekonomi dan kesejahteraan para pedagang kaki lima di Kota Makassar.
3. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama bisa mengambil penelitian dengan pendekatan yang lain. Misalnya bukan lagi dari sisi retribusi tetapi dari sisi kondisi pedagang kaki lima itu sendiri diperhadapkan pada kemiskinan di kota Makassar bahkan dari berbagai sisi pendekatan ilmu sosial sehingga penelitian mengenai pedagang kaki lima lebih mendalam dan lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Edi, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, AlfaBeta, Bandung.
- Astuti E.P. 2006. *Analisis Retribusi Pagar Dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Kasus Pasar Regional Daya)*. Makassar. Universitas Hasanuddin. Skripsi.
- Devas. N. Binder B. Booth. A. Davey. K. Kelly. R. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Alih Bahasa Masri Moris. UI-Press. Jakarta.
- Gibson.1989. *State And Local Public Finance*. USA.
- Halim. 2004. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Makassar*. UGM. Yogyakarta.
- Harun. Hamrolie. 1994. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Gunung Agung. Jakarta.
- Insukindro. 1994. *Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Jhingan. M.L. 1994. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
- John F, Due. 1985. *Keuangan Negara Perekonomian Sektor Pemerintah*. UI-Press. Jakarta.
- Jones. 1995. *Teori Ekonomi Makro*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Kaho, Y. Riwo. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kunardjo. 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Edisi ketiga. UI-Press. Jakarta.
- Lubis dan Husaeni. *Ekonomi Publik*. Jakarta.
- Mangkusoebroto. G. 1993. *Ekonomi Publik*. BPFE. UGM. Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Makfatih A. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Muljono, Eugenia, Liliawati, 2001. *Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Harvarindo, Jakarta.

- Munawir H.S. 1997. *Perpajakan*. Liberty. Yogyakarta.
- Nelly. 2001. *Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Kota Pare-Pare*. Makassar. Universitas Hasanuddin. Skripsi.
- Nurhani. Q. 2000. *Penerimaan Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Nurdjaman. 1992. *Ekonomi Mikro*. BPFE. Yogyakarta.
- Prakosa. K. B. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta.
- Pratama A.E. 2006. *Analisis Retribusi Pasar Dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Kasus Pasar Regional Daya)*. Makassar. Universitas Hasanuddin. Skripsi.
- Santoso. 1995. *Peranan Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman*.
- Saragih, J. Panglima. 1996. *Peningkatan Penerimaan Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan*. No. 6, 36-43.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko. 1982. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. BPFE. Yogyakarta.
- Soeparmoko, 1997. *Keuangan Negara dalam Teori dan Publik*, BPFE, Jakarta.
- Subarsono, 2006. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sommerfeld. Ray. M. 1996. *State And Local Public Finance*. Irin. USA.
- Syamsi. Ibnu. 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Sylvasari. 2004. *Pengaruh Retribusi Pajak Hotel Terhadap PAD (Studi Kasus:P Beberapa Hotel di Makassar)*. Makassar. Universitas Hasanuddin. Skripsi.
- Tarigan. Eliestra. 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang*. Deli Serdang. Universitas Sumatera Utara. Tesis.

- Triatmoko. G. Dewanto. 2001. *Potensi Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Retribusi Terminal*. Tesis S-2 PPs UGM. Yogyakarta.
- Widjaya. A. W. 1992. *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II*. Rajawali Press, Jakarta.
- Widjaya, H.A.W., 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- _____. 1995. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penetapan Kriteria Usaha Kecil*. Jakarta.
- _____. 2002. *Keputusan Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. 2009. *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi*. Jakarta.

Lampiran 1

Data Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Unit Pasar di Kota Makassar

Tahun 2009-2014

No	Unit Pasar	2009	2.010	2.011	2012	2013	2014
1	MAKASSAR MALL	726	689	606	348	481	717
2	TERONG	560	576	625	688	700	705
3	KAMPUNG BARU	15	18	20	22	17	19
4	PANNAMPU	220	211	234	258	325	340
5	KALIMBU	235	238	265	266	268	274
6	KERUNG2	-	-	-	35	24	24
7	MARICAYA	37	34	26	30	20	25
8	SAMBUNG JAWA	94	102	185	179	270	275
9	CENDERAWASIH	-	-	-	30	20	38
10	PA'BAENG-BAENG	386	575	377	381	428	229
11	PA'BAENG-BAENG TIMUR	-	-	-		60	42
12	PARANG TAMBUNG	469	457	494	498	77	77
13	PANAKKUKANG	67	70	75	86	145	145
14	DAYA	271	258	237	259	330	330
15	MANDAI	41	47	51	60	157	119
16	DARURAT UTARA	284	315	306	312	295	295
17	DARURAT SELATAN	-	-	-	300	298	297
18	PK5 (Trotoar Jalan)	-	-	-			492
Total		3405	3590	3501	3752	3915	4443

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya, Kota Makassar

Lampiran 2

**Rincian Realisasi Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan
Unit Pasar di Kota Makassar Tahun 2009**

No	Unit Pasar	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
1	Makassar Mall	466.691.250	378.441.250	81,09
2	Terong	559.226.200	383.540.300	68,58
3	Butung	-	-	-
4	Kampung Baru	20.644.763	16.724.850	81,01
5	Pannampu	186.863.950	158.287.000	84,71
6	Kalimbu	192.889.000	154.378.000	80,03
7	Kerung-Kerung	-	-	-
8	Maricaya	23.132.350	12.314.450	53,23
9	Sawah	-	-	-
10	Mamajang	-	-	-
11	Sambung Jawa	154.049.500	144.362.900	93,71
12	Cenderawasih	-	-	-
13	Pa'baeng-baeng	306.061.410	281.802.240	92,07
14	Pa'baeng-baeng Timur	-	-	-
15	Parang Tambung	135.471.360	123.546.800	91,20
16	Panakkukang	68.584.000	63.270.400	92,25
17	Daya	130.871.800	117.921.000	90,10
18	Mandai	20.017.350	17.016.804	85,01
19	Darurat Utara	350.680.000	321.814.500	91,77
20	Darurat Selatan	-	-	-
Total		2.615.182.933	2.173.420.494	83,11

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya, Kota Makassar

Lampiran 3

**Rincian Realisasi Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan
Unit Pasar di Kota Makassar Tahun 2010**

No	Unit Pasar	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
1	Makassar Mall	446.297.700	368.418.250	82,55
2	Terong	538.585.125	405.562.300	75,30
3	Butung	-	-	-
4	Kampung Baru	20.957.475	18.536.850	88,45
5	Pannampu	190.653.250	154.177.250	80,87
6	Kalimbu	192.849.800	156.511.200	81,16
7	Kerung-Kerung	-	-	-
8	Maricaya	25.889.200	10.621.300	41,03
9	Sawah	-	-	-
10	Mamajang	-	-	-
11	Sambung Jawa	159.285.500	150.444.250	94,45
12	Cenderawasih	-	-	-
13	Pa'baeng-baeng	305.983.200	790.413.600	258,32
14	Pa'baeng-baeng Timur	-	-	-
15	Parang Tambung	130.920.360	115.184.400	87,98
16	Panakkukang	69.912.650	72.428.900	103,60
17	Daya	134.701.000	108.103.000	80,25
18	Mandai	23.495.490	21.268.368	90,52
19	Darurat Utara	352.480.000	348.580.000	98,89
20	Darurat Selatan	-	-	-
Total		2.592.010.750	2.720.249.668	104,95

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya, Kota Makassar

Lampiran 4

**Rincian Realisasi Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan
Unit Pasar di Kota Makassar Tahun 2011**

No	Unit Pasar	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
1	Makassar Mall	429.282.172	276.283.170	64,36
2	Terong	579.721.211	467.448.488	80,63
3	Butung	-	-	-
4	Kampung Baru	21.326.049	19.550.924	91,68
5	Pannampu	202.893.950	169.687.250	83,63
6	Kalimbu	214.986.569	198.464.253	92,31
7	Kerung-Kerung	-	-	-
8	Maricaya	26.177.930	7.171.635	27,40
9	Sawah	11.001.194	8.584.385	78,03
10	Mamajang	-	-	-
11	Sambung Jawa	220.869.413	238.148.113	107,82
12	Cenderawasih	-	-	-
13	Pa'baeng-baeng	489.338.989	402.143.171	82,18
14	Pa'baeng-baeng Timur	-	-	-
15	Parang Tambung	148.801.101	142.195.848	95,56
16	Panakkukang	101.450.173	87.414.018	86,16
17	Daya	162.715.808	96.797.440	59,49
18	Mandai	25.206.750	23.172.675	91,93
19	Darurat Utara	395.450.000	344.919.000	87,22
20	Darurat Selatan	-	-	-
Total		3.029.221.309	2.481.980.370	81,93

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya, Kota Makassar

Lampiran 5

**Rincian Realisasi Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan
Unit Pasar di Kota Makassar Tahun 2012**

No	Unit Pasar	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
1	Makassar Mall	103.991.810	122.888.489	118,17
2	Terong	673.337.837	601.794.296	89,37
3	Butung	-	-	-
4	Kampung Baru	26.774.945	25.856.820	96,57
5	Pannampu	213.356.335	219.426.947	102,85
6	Kalimbu	206.259.545	220.635.269	106,97
7	Kerung-Kerung	-	-	-
8	Maricaya	34.920.685	26.543.467	76,01
9	Sawah	-	-	-
10	Mamajang	-	-	-
11	Sambung Jawa	265.090.126	222.819.530	84,05
12	Cenderawasih	-	-	-
13	Pa'baeng-baeng	395.227.775	439.562.741	111,22
14	Pa'baeng-baeng Timur	-	-	-
15	Parang Tambung	155.360.535	155.441.336	100,05
16	Panakkukang	116.668.265	125.831.104	107,85
17	Daya	190.973.342	159.767.770	83,66
18	Mandai	29.013.796	31.839.469	109,74
19	Darurat Utara	230.990.184	320.616.612	138,80
20	Darurat Selatan	206.760.000	88.348.000	42,73
Total		2.848.725.180	2.761.371.850	96,93

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya, Kota Makassar

Lampiran 6

**Rincian Realisasi Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan
Unit Pasar di Kota Makassar Tahun 2013**

No	Unit Pasar	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
1	Makassar Mall	464.334.525	736.322.167	158,58
2	Terong	807.877.120	760.094.377	94,09
3	Butung	-	-	-
4	Kampung Baru	25.050.312	27.603.042	110,19
5	Pannampu	408.699.008	425.784.031	104,18
6	Kalimbu	292.439.673	327.124.331	111,86
7	Kerung-Kerung	30.606.030	14.989.818	48,98
8	Maricaya	35.654.669	35.194.005	98,71
9	Sawah	-	-	-
10	Mamajang	-	-	-
11	Sambung Jawa	318.512.428	339.845.005	106,70
12	Cenderawasih	24.694.466	20.307.334	82,23
13	Pa'baeng-baeng	489.797.459	484.127.881	98,84
14	Pa'baeng-baeng Timur	111.336.293	108.886.835	97,80
15	Parang Tambung	111.767.162	112.029.596	100,23
16	Panakkukang	201.793.773	217.421.534	107,74
17	Daya	382.536.378	274.033.222	71,64
18	Mandai	131.545.266	117.808.626	89,56
19	Darurat Utara	265.500.000	287.858.000	108,42
20	Darurat Selatan	272.400.000	283.739.000	104,16
Total		4.374.544.562	4.573.168.804	104,54

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya, Kota Makassar

Lampiran 7

**Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2009**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Penerimaan	Tahun 2009		
		Target	Realisasi	%
A	Pendapatan Asli Daerah			
1	Pajak Daerah	115.213.922.000	115.223.338.974	100,01
2	Retribusi Daerah	44.281.324.000	39.980.839.820	90,29
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.946.057.000	5.665.752.808	95,29
4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.187.084.000	9.828.794.212	87,86
	Jumlah PAD	176.628.387.000	170.698.725.814	373,44
B	Dana Perimbangan			
1	Bagi Hasil Pajak	132.700.443.000	142.662.186.490	107,51
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.843.840.000	721.325.116	39,12
	Jumlah Bagi Hasil	134.544.283.000	143.383.511.606	106,57
	Jumlah PAD + Bagi Hasil	311.172.670.000	314.082.237.420	100,94
3	Dana Alokasi Umum	647.299.704.000	647.299.704.000	100,00
4	Dana Alokasi Khusus	43.151.000.000	43.151.000.000	100,00
	Jumlah Dana Perimbangan	824.994.987.000	833.834.215.606	101,07
C	Lain-lain Pendapatan yang Sah			
1	Pendapatan Hibah Dari Luar	651.006.000	1.559.018.800	239,48
2	Dana Darurat	-	-	-
3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	121.500.000.000	115.012.318.874	94,66
4	Dana Penyesuaian	49.180.487.000	68.965.037.000	140,23
5	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	24.793.296.800	25.648.404.800	103,45
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	196.124.789.000	211.184.779.474	107,68
	Total Pendapatan (A+B+C)	1.197.748.163.800	1.215.717.720.894	101,50

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKA)

Lampiran 8

**Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2010**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Penerimaan	Tahun 2010		
		Target	Realisasi	%
A	Pendapatan Asli Daerah			
1	Pajak Daerah	134.216.181.000	133.551.818.678	99,51
2	Retribusi Daerah	62.971.506.000	58.729.103.725	94,85
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.124.203.000	5.817.813.865	95,00
4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.617.000.000	11.037.594.820	81,06
	Jumlah PAD	216.928.890.000	210.136.331.088	96,87
B	Dana Perimbangan			
1	Bagi Hasil Pajak	176.354.985.000	170.552.155.100	96,71
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.843.840.000	708.265.127	39,22
	Jumlah Bagi Hasil	178.160.825.000	171.260.420.227	96,13
	Jumlah PAD + Bagi Hasil	395.089.715.000	381.396.751.315	96,53
3	Dana Alokasi Umum	644.266.427.000	644.266.427.000	100,00
4	Dana Alokasi Khusus	45.73.700.000	45.73.700.000	100,00
	Jumlah Dana Perimbangan	868.180.952.000	861.280.547.227	99,21
C	Lain-lain Pendapatan yang Sah			
1	Pendapatan Hibah Dari Luar	-	650.445.600	
2	Dana Darurat	100.000.000	100.000.000	100,00
3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	148.066.788.000	155.704.122.538	105,16
4	Dana Penyesuaian	191.744.564.000	190.426.514.332	99,31
5	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah			
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	371.276.039.000	378.245.771.270	101,88
	Total Pendapatan (A+B+C)	1.456.385.881.000	1.449.662.649.585	99,54

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKA)

Lampiran 9

Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Makassar

Tahun Anggaran 2011

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Penerimaan	Tahun 2011		
		Target	Realisasi	%
A	Pendapatan Asli Daerah			
1	Pajak Daerah	260.486.460.000	270.547.821.316	103,86
2	Retribusi Daerah	66.549.806.000	62.043.147.863	93,23
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.391.525.000	6.355.200.148	99,43
4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.907.520.000	12.746.383.261	107,04
	Jumlah PAD	345.335.311.000	351.692.552.588	101,84
B	Dana Perimbangan			
1	Bagi Hasil Pajak	141.816.546.000	124.804.208.709	88,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.805.840.000	1.690.398.816	93,61
	Jumlah Bagi Hasil	143.622.386.000	126.494.607.525	88,07
	Jumlah PAD + Bagi Hasil	488.857.697.000	478.187.160.113	97,80
3	Dana Alokasi Umum	718.481.339.000	718.481.122.000	100,00
4	Dana Alokasi Khusus	60.898.100.000	60.898.000.000	100,00
	Jumlah Dana Perimbangan	923.001.825.000	905.873.927.525	98,14
C	Lain-lain Pendapatan yang Sah			
1	Pendapatan Hibah Dari Luar	1.650.000.000	970.971.485	58,85
2	Dana Darurat	-	-	-
3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	167.338.118.000	166.494.273.844	99,50
4	Dana Penyesuaian	262.313.899.000	262.927.499.880	100,23
5	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	40.471.289.000	40.661.289.800	100,35
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	471.773.306.000	471.004.035.009	99,84
	Total Pendapatan (A+B+C)	1.728.570.515.122	1.728.570.515.122	99,34

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKA)

Lampiran 10

**Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2012**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Penerimaan	Tahun 2012		
		Target	Realisasi	%
A	Pendapatan Asli Daerah			
1	Pajak Daerah	337.167.338.150	388.445.926.266	115,21
2	Retribusi Daerah	84.141.194.850	69.257.410.559	82,31
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.553.899.000	6.448.544.026	98,39
4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.372.520.000	20.820.918.657	155,70
	Jumlah PAD	441.234.952.000	484.972.799.508	109,91
B	Dana Perimbangan			
1	Bagi Hasil Pajak	142.585.034.000	160.543.559.310	112,59
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.364.157.000	1.152.927.344	84,52
	Jumlah Bagi Hasil	143.949.191.000	161.696.486.654	112,33
	Jumlah PAD + Bagi Hasil	585.184.143.000	646.669.286.162	110,51
3	Dana Alokasi Umum	911.122.797.000	911.122.797.000	100,00
4	Dana Alokasi Khusus	32.644.320.000	32.644.320.000	100,00
	Jumlah Dana Perimbangan	1.087.716.308.000	1.105.463.603.654	101,63
C	Lain-lain Pendapatan yang Sah			
1	Pendapatan Hibah Dari Luar	-	-	-
2	Dana Darurat	-	-	-
3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	186.622.687.440	194.255.865.128	104,09
4	Dana Penyesuaian	211.436.166.000	211.436.166.000	100,00
5	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	49.996.979.560	49.996.979.560	100,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	448.055.833.000	455.689.010.688	101,70
	Total Pendapatan (A+B+C)	1.977.007.093.000	2.046.125.413.850	103,50

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKA)

Lampiran 11

**Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2013**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Penerimaan	Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%
A	Pendapatan Asli Daerah			
1	Pajak Daerah	460.567.090.000	518.703.083.895	112,62
2	Retribusi Daerah	86.772.319.000	79.634.809.626	91,77
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.975.558.000	6.355.687.310	91,11
4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.412.495.000	16.351.318.470	106,09
	Jumlah PAD	569.727.462.000	621.044.899.301	109,01
B	Dana Perimbangan			
1	Bagi Hasil Pajak	76.420.044.000	85.548.577.766	111,95
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.150.985.000	921.167.171	80,03
	Jumlah Bagi Hasil	77.571.029.000	86.469.744.937	111,47
	Jumlah PAD + Bagi Hasil	647.298.491.000	707.514.644.238	109,30
3	Dana Alokasi Umum	1.033.583.903.000	1.033.583.903.000	100,00
4	Dana Alokasi Khusus	40.886.880.000	40.886.880.000	100,00
	Jumlah Dana Perimbangan	1.152.041.812.000	1.160.940.527.937	100,77
C	Lain-lain Pendapatan yang Sah			
1	Pendapatan Hibah Dari Luar	-	-	-
2	Dana Darurat	-	-	-
3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	209.916.715.000	222.825.659.606	106,15
4	Dana Penyesuaian	297.058.872.000	297.058.872.914	100,00
5	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	58.911.771.000	58.911.771.360	100,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	565.887.358.000	578.796.303.880	102,28
	Total Pendapatan (A+B+C)	2.287.656.632.000	2.360.781.731.118	103,20

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKA)

BIODATA

Identitas Diri



Nama : Muthia Nurfitriani Ramlan
Tempat, Tanggal Lahir : Pare-pare, 29 April 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Bumi Sudiang Permai Blok A/112
Telepon : 085299099670
Alamat *Email* : nurfitrianimuthia@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
 - SDN Papandayan I Bogor
 - SMP Negeri 12 Makassar
 - SMA Negeri 6 Makassar
 - S1 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- Pendidikan Non Formal
 - Latihan Kepemimpinan Tingkat I Himajie

Pengalaman Organisasi

- Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FE-UH Periode 2012-2013

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 10 Juni 2015

Muthia Nurfitriani Ramlan